

WALI KOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BABI ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur menggunakan indikator yang bersifat progresif.

16. Permasalahan ...

16. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Arah Pembangunan adalah komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan.
19. Indikator Utama Pembangunan adalah ukuran keberhasilan pencapaian arah pembangunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada:
   a. RPJPN;
   b. RPJPD Provinsi Banten; dan
   c. RTRW.
(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(3) RPJPD Tahun 2025-2045 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2045.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis;
   d. bab IV memuat visi dan misi Daerah;
   e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
   f. bab VI memuat penutup.
(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 5

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

IMAM RANA HARDIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 6,60) / (TAHUN 2024)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 7

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 11

2.1.1 Geografi 12

2.1.2 Demografi 26

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 30

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 30

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya 39

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH 41

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah 41

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) 45

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah 49

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi 54

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM 60

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SERANG TAHUN 2008-2025 63

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK 75

2.6.1 Proyeksi Demografi 76

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana 80

2.7 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA SERANG 87

2.7.1 Kedudukan Kota Serang Secara Regional 88

2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kota Serang 90

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 96

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 97

3.2 ISU-ISU STRATEGIS 114

3.2.1 Isu Strategis Internasional 115

3.2.2 Isu Strategis Nasional 120

3.2.3 Isu Strategis Daerah 124

3.2.4 Isu Strategis Kota Serang 144

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 154

4.1 VISI KOTA SERANG 156

4.2 MISI KOTA SERANG 163

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 169

5.1. ARAH KEBIJAKAN KOTA SERANG TAHUN 2025-2045 172

5.1.1 Misi Kesatu: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan (Transformasi Sosial) 173

5.1.2 Misi Kedua: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif (Transformasi Ekonomi) 178

5.1.3 Misi Ketiga: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik 183

5.1.4 Misi Keempat: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 188

5.1.5 Misi Kelima: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan 192

5.2. Sasaran Pokok Kota Serang 2025-2045 196

5.2.1 Sasaran Pokok Misi Kesatu Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan (Transformasi Sosial) 197

5.2.2 Sasaran Pokok Misi Kedua: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif (Transformasi Ekonomi) 198

5.2.3 Sasaran Pokok Misi Ketiga: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik (Transformasi Tata Kelola) 199

5.2.4 Sasaran Pokok Misi Keempat: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 200

5.2.5 Sasaran Pokok Misi Kelima: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan 202

5.3 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) 209

BAB VI PENUTUP 217

LAMPIRAN METADATA RPJPD KOTA SERANG TAHUN 2025-2045 221

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan (km2) Tahun 2023 12

Tabel II.2 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari Kota Serang Tahun 2023 16

Tabel II.3 Suhu Udara Kota Serang Tahun 2023 16

Tabel II.4 Kelembapan Udara Kota Serang Tahun 2023 17

Tabel II.5 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang Tahun 2021 – 2023 (m3) 18

Tabel II.6 Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Kota Serang 19

Tabel II.7 Kelas Risiko Bencana Kota Serang Per Kecamatan 20

Tabel II.8 Indikator Pangan Kota Serang Tahun 2018 –2022 21

Tabel II.9 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2018 – 2023 22

Tabel II.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pangan Kota Serang Tahun 2018-2022 23

Tabel II.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Serang Tahun 2018-2022 24

Tabel II.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Sampah Kota Serang Tahun 2018 - 2 022 26

Tabel II.13 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023 28

Tabel II.14 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2008-2023 28

Tabel II.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2023 (Jiwa) 28

Tabel II.16 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha atau Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang Tahun 2013- 2023 (%) II -27 31

Tabel II.17 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kota Serang Tahun 2008-2023 34

Tabel II.18 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Serang Tahun 2013-2023 36

Tabel II.19 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Kota Serang Tahun 2019- 2022 39

Tabel II.20 Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender, Kota Serang Tahun 2019-2023 40
Tabel II.21 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah) 42
Tabel II.22 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (%) 43
Tabel II.23 Indeks Pendidikan Kota Serang Tahun 2020-2023 47
Tabel II.24 Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan di Kota Serang Tahun 2020-2023 47
Tabel II.25 Angka Literasi dan Numerasi untuk Satuan Pendidikan dan Peserta Didik di Kota Serang Tahun 2021-2023 48
Tabel II.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023.. 50
Tabel II.27 Kondisi Infrastruktur Pendidikan Kota Serang Tahun 2023 51
Tabel II.28 Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kota Serang Tahun 2019-2023 52
Tabel II.29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Tahun 2018-2022 53
Tabel II.30 Capaian Indikator Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2019-2022 54
Tabel II.31 Pemakaian Tenaga Listrik Kota Serang Tahun 2019-2023 (Rupiah) 55
Tabel II.32 Posisi Arus Kas Investasi TA 2021 dan 2022 56
Tabel II.33 Lama Proses Perizinan Kota Serang 57
Tabel II.34 Angka Kriminalitas Kota Serang Tahun 2018 – 2023 59
Tabel II.35 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Serang Tahun 2019-2023 60
Tabel II.36 Jumlah Demonstrasi di Kota Serang Tahun 2018 – 2023..... 60
Tabel II.37 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2018-2023..... 61
Tabel II.38 Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Kota Serang Tahun 2018 – 2023..... 61
Tabel II.39 Nilai IKM Kota Serang Tahun 2019 – 2023..... 62
Tabel II.40 Capaian Realisasi AKIP Kota Serang Tahun 2019 – 2022 62
Tabel II.41 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2019 – 2023 63

Tabel II.42 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Serang Tahun 20082022 65
Tabel II.43 Kriteria Penilaian Kinerja 66
Tabel II.44 Periode I Tahun 2008-2013 67
Tabel II.45 Periode II Tahun 2014-2018 68
Tabel II.46 Periode III Tahun 2018-2023 71
Tabel II.47 Periode IV Tahun 2024-2026 73
Tabel II.48 Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045 78
Tabel II.49 Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045 berdasarkan Jenis Kelamin..... 79
Tabel II.50 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang 79
Tabel II.51 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal 83
Tabel II.52 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 84
Tabel II.53 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik Kota Serang 85
Tabel II.54 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Serang 86
Tabel II.55 Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Serang 87
Tabel II.56 Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Serang 88
Tabel II.57 Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat sebagai Penunjang Pusat Pertumbuhan 94
Tabel II.58 Capaian Target Komponen, Sub Komponen, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikasi Program RTRW 95
Tabel III.1 IPM Kota Serangdibandingkandengan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2023..... 101
Tabel III.2 Angka Partisipasi Sekolah Kota Serang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun2019-2021 102
Tabel III.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kabupaten/KotadiProvinsi Banten Tahun 2017-2022 103
Tabel III.4 Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022 104
Tabel III.5 Rata-rata Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023. 105
Tabel III.6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022 106
Tabel III.7 Gini Rasio Kabupaten/Kota di provinsi Banten Tahun 2021-2023..... 106
Tabel III.8 Jumlah Tamu Asing dan Domestik Berdasarkan Akomodasi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2020 107

Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2023 108
Tabel III.10 IPM Kota Serang dibandingkan dengan wilayah sekitar Tahun 2019-2023 109
Tabel III.11 Angka Partisipasi Sekolah Kota Serang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2019-2021 110
Tabel III.12 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar 112
Tabel III.13 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Serang tahun 2019-2023 113
Tabel III.14 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang dan Provinsi Banten .. 115
Tabel III.15 Indeks SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023 115
Tabel III.16 Penyelarasan 17 Arah Pembangunan Nasional dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 127
Tabel III.17 Penyandingan Kerangka Kerja Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB dengan Permasalahan RPJPD Kota Serang 132
Tabel III.18 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Serang 144
Tabel III.19 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Serang 145
Tabel IV.1 Persandingan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang Tahun 2025- 2045 165
Tabel V.1 Arah Kebijakan Transformasi Misi 1 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 179
Tabel V.2 Arah Kebijakan Transformasi Misi 2 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 184
Tabel V.3 Arah Kebijakan Transformasi Misi 3 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 190
Tabel V.4 Arah Kebijakan Transformasi Misi 4 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 194
Tabel V.5 Arah Kebijakan Transformasi Misi 5 RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 198
Tabel V.6 Misi, Arah Pembangunan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan Kota Serang 206
Tabel V.7 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) Kota Serang 212
Tabel V.8 Visi, Misi, Tema Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan Kota Serang Tahun 2025-2045 215

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keselarasan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang	2
Gambar I.2	Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	7
Gambar II.1	Peta Batas Administrasi Kota Serang	13
Gambar II.2	Peta Topografi Kota Serang	14
Gambar II.3	Indeks Resiko Bencana Kota Serang Tahun 2015-2023	19
Gambar II.4	Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023	27
Gambar II.5	Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2023	30
Gambar II.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2013-2022	31
Gambar II.7	Inflasi di Kota Serang Tahun 2020-2023 (%)	33
Gambar II.8	Indeks Pembangunan Manusia di Kota Serang Tahun 2008-2023	34
Gambar II.9	Tingkat Kemiskinan Kota Serang Tahun 2013-2023	35
Gambar II.10	Indeks Gini Kota Serang Tahun 2013-2023	37
Gambar II.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang Tahun 2013-2023	38
Gambar II.12	PDRB per Kapita Kota Serang Tahun 2019-2023 (Juta Rp/Kapita)	45
Gambar II.13	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Serang Tahun 2021	46
Gambar II.14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Serang Tahun 2019-2023	49
Gambar II.15	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2019-2023	51
Gambar II.16	Nilai Total Investasi di Kota Serang Tahun 2013-2023 (dalam trilyun rupiah)	58
Gambar II.17	Capaian Indeks SPBE Kota Serang Tahun 2021 – 2023	64
Gambar II.18	Rata-rata Hasil Capaian Kinerja RPJPD Tiap Periode RPJMD Kota Serang	66
Gambar II.19	Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2025-2045	80
Gambar II.20	Ilustrasi Konsep Pusat Pertumbuhan	89
Gambar II.21	Peta Administrasi Kota Serang	90
Gambar II.22	Peta Hirarki Struktur Ruang Kota Serang	92
Gambar II.23	Kawasan Strategis Kota Serang	93

Gambar III.1	Permasalahan RPJPD Kota Serang Tahun2025-2045	100
Gambar III.2	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023	116
Gambar III.3	Megatren Dunia 2045	117
Gambar III.4	Visi Indonesia Emas204	124
Gambar III.5	17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045	126
Gambar III.6	Visi & Misi RPJPD Provinsi Banten	127
Gambar III.7	Penyandingan Permasalahan RPJPD Provinsi Banten dan Kota Serang Tahun 2025-2045	131
Gambar III.8	Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kota Serang	136
Gambar III.9	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Serang	145
Gambar III.10	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Serang	146
Gambar III.11	Rencana Pola Ruang Kota Serang	146
Gambar IV.1	Kerangka Logis Perumusan Visi Kota Serang 2025-2045	160
Gambar IV.2	Alur Keterkaitan Pokok Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045	161
Gambar IV.3	Keterkaitan Pokok Visi dengan Sasaran Visi Kota Serang	164
Gambar IV.4	Penyelarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Banten, dan Visi Kota Serang Tahun 2025-2045	164
Gambar IV.5	Keterhubungan antara Strategi Transformasi Nasional, Pokok Visi dan Misi RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045	166
Gambar V.1	Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Serang	172
Gambar V.2	Arah Kebijakan berdasarkan Transformasi Sosial/Misi Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan di Kota Serang 2025-2045	176
Gambar V.3	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi/Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif Kota Serang 2025-2045	181
Gambar V.4	Arah Kebijakan Mewujudkan Tata Kelola Kota Serang 2025-2045	186
Gambar V.5	Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Kota Serang 2025-2045	191
Gambar V.6	Arah Kebijakan berdasarkan Misi Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan di Kota Serang 2025-2045	196

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Kota Serang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Kesultanan Banten yang telah ada semenjak abad ke-16. Secara geografis, Kota Serang berada di jalur utama yang menghubungkan Jawa-Sumatera dan daerah-daerah strategis di pulau Jawa bagian Barat. Sebelum berdiri sebagai daerah otonomi baru, Kota Serang sebelumnya tergabung dengan Kabupaten Serang. Kelahiran Kota Serang juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Dengan kata lain, Kota Serang merupakah daerah yang diperkenankan hadir disebabkan urgensitasnya sebagai suatu wilayah.

Kota Serang memiliki potensi yang cukup besar, terutama dari kekayaan warisan kebudayaan dan juga kuatnya identitas sebagai wilayah yang madani. Pada tahun 2022, Kota Serang digadang-gadang akan menjadi *"The City of Heritage"* sebuah *tagline* yang menggambarkan keseriusan pemerintah dan masyarakat Kota Serang untuk menunjukkan keunggulannya. Keberadaan Masjid Agung Banten menunjukkan identitas masyarakat Kota Serang yang agamis dan beradab. Selain ragam warisan budaya yang dimilikinya, Kota Serang juga sedang berbenah dan bertranformasi menjadi *"Smart City"* dengan merencanakan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, E-Governance, dan infrastruktur digital.

Dengan potensi, sumber daya dan prestasi yang dimiliki, Pemerintah Kota Serang perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Pembuatan kebijakan pembangunan yang memperhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan ini menjadi panduan dalam mengarahkan dan menekankan strategi pembangunan daerah, karena perencanaan yang baik akan membentuk landasan bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, peran signifikan dari perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah.

Sebagai ibu kota Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang memiliki peran yang signifikan dan strategis serta ekonomis dalam penyediaan

layanan dan infrastruktur yang mendukung berbagai sektor pembangunan. Dengan mempertimbangkan potensi Kota Serang sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh para pengguna moda transportasi darat, keamanan dan kenyamanan yang mampu ditawarkan akan memberikan pengaruh yang signifikan pada capaian kinerja pembangunan provinsi dan nasional. Hal ini sangat relevan mengingat Kota Serang sebagai salah satu pintu gerbang menuju Pulau Jawa dari arah barat dan menjadi wilayah pendukung bagi masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Sumatera. Dengan pertimbangan di atas, pengembangan rencana pembangunan di Kota Serang sangat layak untuk mendapatkan perhatian utama dan diselaraskan dengan pembangunan di Provinsi Banten dan Nasional. Sebagaimana termuat dalam keselarasan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang berikut :

Gambar I.1
Keselarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kota Serang



Atas kebutuhan perencanaan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses perencanaan pembangunan bersifat menyeluruh dengan tujuan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana pembangunan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya juga diamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemantauan dan evaluasi adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung pengendalian pembangunan, perlu dilakukan monitoring guna memantau perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dan mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang

membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap pencapaian kegiatan *(output/outcome)* dari rencana yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, pembangunan Kota Serang pada periode pembangunan jangka panjang tahun 2008-2025 dengan visi "Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025" telah dilaksanakan dengan baik. Dari enam indikator kinerja makro masih terdapat satu indikator yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19 di tahun 2020, sedangkan indikator lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Sedangkan hasil dari evaluasi penilaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD menunjukkan mayoritas indikator memiliki predikat penilaian "TINGGI". Capaian ini tentu masih dapat terus dioptimalkan dengan memperhatikan berbagai faktor penghambat pembangunan di Kota Serang. Oleh karena itu, melalui penyusunan dokumen RPJPD Kota Serang tahun 2025-2045 ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan isu yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Penyusunan RPJPD ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18, yang menetapkan bahwa Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD sebelumnya. Penyusunan dokumen RPJPD bertujuan untuk memberikan dasar acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Dokumen ini esensialnya mencakup arah kebijakan dan sasaran utama pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun dengan mengacu dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan SEB MDN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 600.2.1/3674/SJ dan No. 2 Tahun 2024 Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-

2045 maka RPJPD Kota Serang Tahun 2025 – 2045 disusun untuk membantu pencapaian RPJPD Provinsi Banten sebagai upaya pencapaian RPJPN dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025 – 2045 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJPD. Penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025 – 2045 telah memperhatikan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Serang untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Terkait hal tersebut, disusunlah dokumen acuan perencanaan untuk Kota Serang. Perencanaan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dengan memperhitungkan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Kota Serang untuk dua puluh tahun mendatang dapat direalisasikan melalui penyusunan dokumen RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi *stakeholders* dan Pemerintah Kota Serang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang dalam periode 2025-2045. Adapun RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

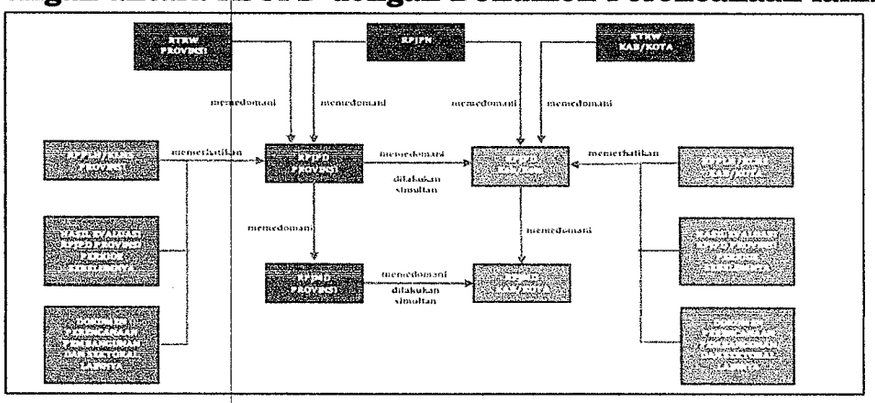
1. Memberikan landasan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilukada;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang Kota Serang dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kota Serang, analisis isu-isu strategis, visi dan misi nasional, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang;

5. Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
6. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan visi, misi dan program Wali Kota setiap 5 tahun;
7. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2025-2045 perlu disesuaikan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang bersinergi dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, termasuk RTRW, KLHS, dan RPJPD Provinsi. Hal ini dikarenakan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan. Secara singkat, dokumen RPJPD diimplementasikan melalui RPJMD, kemudian RPJMD dijabarkan melalui RKPD, dan selanjutnya RKPD ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambar I.2
Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



***Sumber**: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024*

a. Hubungan antara RPJPD Kota Serang dan RPJPN

RPJPD Kota Serang perlu mengacu pada RPJPN untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang langsung terkait dengan wilayah Kota Serang. Dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan harus didasarkan pada isu-isu dan strategi

pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan antara RPJPD Kota Serang dan RPJPD Provinsi Banten

RPJPD Kota Serang perlu mengikuti dan menyelaraskan dengan RPJPD Provinsi Banten untuk menciptakan sinergi dan keselarasan dalam kebijakan dan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah harus mempertimbangkan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Banten agar tercipta sinkronisasi kebijakan yang efektif. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pemerintah Kota Serang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Banten dan pembangunan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

c. Hubungan antara RPJPD dan RTRW Kota Serang

Penyusunan RPJPD Kota Serang harus mempertimbangkan RTRW Kota Serang. Hal ini dikarenakan strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang terdapat dalam RPJPD Kota Serang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RTRW. RTRW berfungsi sebagai panduan dalam menentukan lokasi pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Pendekatan ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan, di mana perhatian khusus diberikan pada pembangunan di kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan pada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu, mempertimbangkan kondisi dan potensi wilayah, serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan antara RPJPD Kota Serang dengan RPJMD Kota Serang

Dokumen RPJPD memberikan arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD. Visi, misi, dan program prioritas kepala daerah harus memedomani RPJPD, dengan demikian tetap terjaga kesinambungan pembangunan daerah selama 20 tahun walaupun terdapat pergantian kepala daerah. RPJMD akan menjadi pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah

dimuat dalam RPJPD, sehingga visi RPJPD dapat diwujudkan di akhir masa pembangunan jangka panjang. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diturunkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan RPJPD Kota Serang.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kota Serang sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan dengan masing-masing menegaskan prioritas.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

LAMPIRAN

Memuat Definisi Operasional Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan seluruh daerah merumuskan sistem perencanaan pembangunan yang terarah serta terintegrasi yang dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis setiap daerah memiliki berbagai macam dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hierarki dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJPD menjadi bagian tertinggi dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebab dokumen ini sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan yang lain. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki periode pembangunan 20 tahun. Hal tersebut menjadikan dokumen RPJPD ini sebagai dasar serta menjadi acuan relevansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan hingga mewujudkan harapan dari masyarakat daerah.

Gambaran umum kondisi daerah Kota Serang menyajikan kondisi capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum namun tetap komprehensif dengan menampilkan tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah diselesaikan. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan khususnya pada tahun akhir perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Serang. Selanjutnya, analisis gambaran umum tersebut nantinya akan menjadi pedoman awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang tahun 2025-2045 dengan tetap memperhatikan berbagai pedoman dan acuan dari peraturan maupun kajian atau dokumen penting lainnya.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Keterkaitan yang erat antara aspek geografis dan demografis menjadi landasan vital bagi perencanaan masa depan Kota Serang. Dimensi geografis memberikan dasar fisik, sementara dimensi demografis menggambarkan perincian karakteristik penduduk. Kedua aspek ini menjadi poin sentral dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang substansial dan berkelanjutan untuk pengembangan Kota Serang.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi merinci peran strategis suatu daerah, mengidentifikasi potensi sumber daya alam, dan memberikan gambaran kualitas lingkungan hidup serta ancaman kebencanaan, termasuk ancaman perubahan iklim.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Serang sebagai salah satu kota dari 8 (delapan) kota/kabupaten di Provinsi Banten, memiliki luas wilayah 265,787 km^2 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah, dan Pulau. Kota Serang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Serang yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan terbagi atas 67 (enam puluh tujuh) kelurahan, dengan rincian luas wilayah menurut kecamatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:

Tabel II.1
Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan (km^2) Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah
Kecamatan Curug	38,96
Kecamatan Walantaka	36,56
Kecamatan Cipocok Jaya	34,10
Kecamatan Serang	26,55
Kecamatan Taktakan	61,16
Kecamatan Kasemen	68,85

Sumber: *RTRW Kota Serang Tahun 2020-2040, 2020*

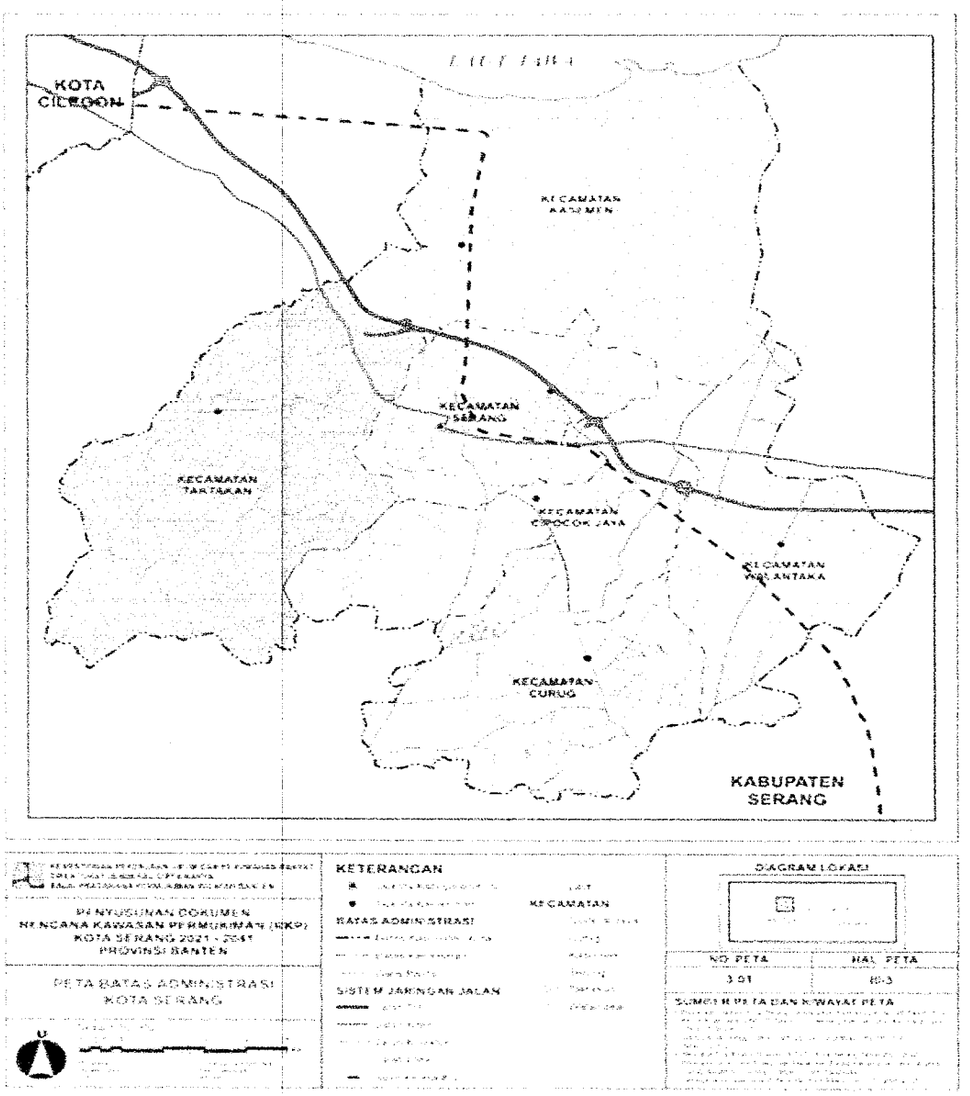
Distribusi luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu: Kecamatan Curug 38,96 km^2, Kecamatan Walantaka 36,56 km^2, Kecamatan Cipocok 34,10 km^2, Kecamatan Serang 26,55 km^2, Kecamatan Taktakan 61,16 km^2, dan Kecamatan Kasemen 68,85 km^2. Secara administratif batas–batas wilayah Kota Serang meliputi sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten;
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringinkurung, dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Serang secara geografis terletak antara 5°99' – 6°22' lintang selatan dan 106°07' 106°25' bujur timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zone 48E, wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m² dari barat ke timur dan 9.337.725 m² sampai dengan 9.312.475 m² dari utara ke selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan sekitar 21,7 km² dan dari barat ke timur 20 km².

Gambar II.1
Peta Batas Administrasi Kota Serang



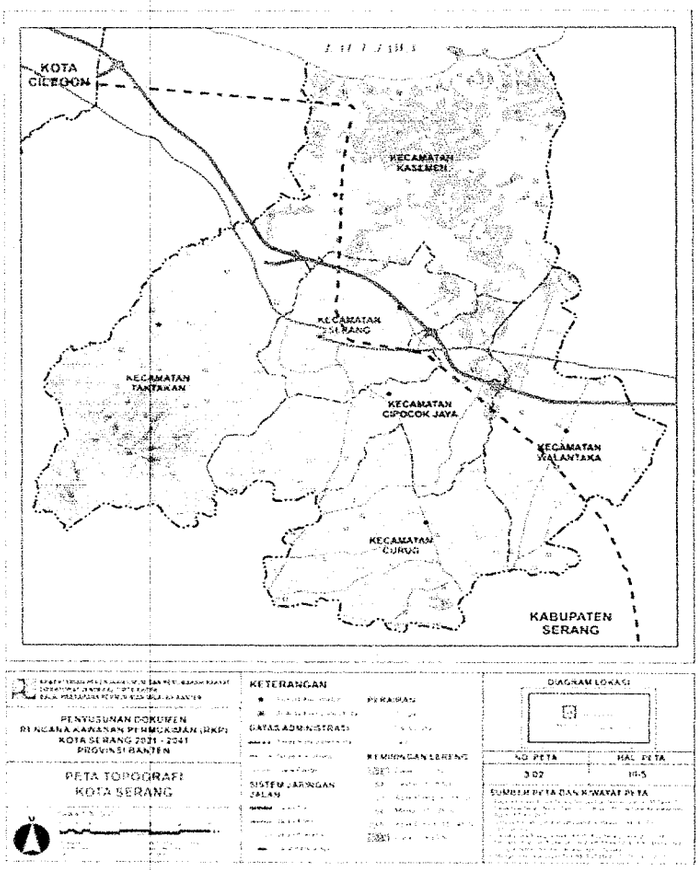
Sumber: *Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2021-2041*

3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi di Kota Serang sebagian besar merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kota Serang memiliki kemiringan lahan yang tersebar di hampir setiap kecamatan sebesar 3-8% dengan luas sebesar 15.459,6 Ha. Kemiringan paling

banyak terdapat pada 8-15% dengan luas sebesar 5.873,31 Ha, kemiringan lahan tersebut paling banyak berada di Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Curug. Kemiringan paling banyak kedua yaitu dengan kemiringan sebesar 0-3% dengan luas sebesar 3.020,72 Ha, kemiringan tersebut paling banyak tersebar di Kecamatan Kasemen. Kemudian untuk kemiringan lahan yang curam dengan kemiringan >45 % memiliki luasan sebesar 134,75 Ha, kemiringan lahan ini hanya ada di Kecamatan Taktakan yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Gambar II.2
Peta Topografi Kota Serang



Sumber: *Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2021-2041*

4. Kondisi Geologi

Kota Serang sebagian besar wilayahnya terdiri dari batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai. Secara geologis Kota Serang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan. Bagian terbesar adalah jenis batuan *pretertiary sediments* dan batuan aluvium, selain itu terdapat sedikit daerah termasuk batuan *Young Quaternary Volcanic Products.* Adapun jenis tanah yang terdapat di Kota Serang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis tanah Aluvial yang merupakan jenis tanah yang terbentuk karena endapan, jenis tanah ini paling banyak berada di wilayah Serang Utara dan memiliki manfaat untuk bidang pertanian. Kemudian paling banyak tersebar di wilayah Serang Barat

yaitu tanah regosol yang merupakan tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Terakhir tanah Padsolik merupakan tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah. Tanah Padsolik berada di seluruh wilayah Kota Serang dengan mayoritas berada di Wilayah Serang Selatan.

5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kota Serang meliputi sistem air bawah tanah dan air pemukaan. Potensi sumber air bawah tanah di Kota Serang di kelompokan berdasarkan kelompok akuifer. Pertama, kelompok akuifer air tanah tertekan, yang dapat dijumpai pada kedalaman sampai lebih dari 100 m di bawah permukaan laut. Kedua, kelompok akuifer tanah jarang yang mana akuifer ini umumnya kurang produktif dan berkelulusan rendah. Ketiga, kelompok akuifer produktif yang merupakan gabungan antara sistem akuifer menerus dan tidak menerus. Wilayah Kota Serang umumnya termasuk akuifer produktif dengan debit air 5-10 liter/detik.

Adapun potensi air permukaan di wilayah Kota Serang bersumber dari sungai yang mengalir di wilayah Kota Serang seperti sungai Cibanten (5 Km). Kondisi Hidrologi di Kota Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dalam pengelolaan sungai dikenal sebagai bagian dari Satuan Wilayah Sungai (SWS). Sungai-sungai yang terdapat di kota Serang memiliki lebar yang relatif kecil dan pendek. Salah satu DAS yang terdapat di Kota Serang yaitu DAS Cibanten yang merupakan bagian dari SWS Ciujung - Ciliman. Di samping keberadaan sungai, di Kota Serang terdapat pula jenis air permukaan berupa rawa, situ dan waduk.

Secara umum baik air bawah tanah maupun air permukaan tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Kota Serang yang berada di dataran rendah dan cukup berdekatan dengan pantai, serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahunnya.

6. Kondisi Klimatologi

a. Curah Hujan

Sepanjang tahun 2023, tingkat curah hujan di Kota Serang bervariasi dengan curah hujan tertinggi pada bulan Agustus yaitu 8.888,00 mm dan curah hujan terendah pada bulan September yaitu 0,50 mm. Adapun dari total 155 hari hujan di Kota Serang, hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali di bulan Oktober. Selengkapnya jumlah curah hujan, jumlah hari hujan dan rata-rata harian penyinaran matahari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari Kota Serang Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	148,70	27	3,9
Februari	310,90	24	3,2
Maret	276,50	18	5,9
April	130,10	12	6,5
Mei	69,10	7	5,3
Juni	151,30	17	5,0
Juli	89,00	9	5,3
Agustus	8.888,00	8	7,4
September	0,50	3	7,9
Oktober	8.888,00	2	7,9
November	138,20	16	4,7
Desember	77,80	12	5,7

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

b. Suhu

Suhu Kota Serang selama tahun 2023 memiliki rata-rata suhu udara sebesar 28,1° Celcius. Suhu tertinggi Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 37,4°C di bulan Oktober dan suhu minimum 20,6°C di bulan Desember. Suhu yang relatif tinggi umum dimiliki oleh suatu wilayah yang sebagian besarnya berada di dataran rendah. Untuk melihat kondisi suhu rata-rata di Kota Serang selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3
Suhu Udara Kota Serang Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara Maksimun, Minimum dan Rata-rata di Kota Serang (Celcius)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
Januari	27,40	34,60	22,80
Februari	27,10	33,80	23,00
Maret	27,60	34,30	22,40
April	28,30	35,00	23,00
Mei	28,60	35,30	23,50
Juni	27,90	34,40	22,40
Juli	27,60	33,80	22,40
Agustus	27,80	34,60	22,10
September	28,30	36,50	21,80

Bulan	Suhu Udara Maksimun, Minimum dan Rata-rata di Kota Serang (Celcius)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
Oktober	29,20	37,40	23,00
November	28,60	36,20	23,00
Desember	28,70	36,50	20,60

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024.*

c. Kelembaban

Kelembapan udara relatif mengukur seberapa banyak uap air yang ada di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum yang dapat diampuni udara pada suhu tertentu. Kelembapan udara Kota Serang pada tahun 2023 memiliki kelembapan tertinggi pada bulan Januari hingga Maret, Juni, Juli, dan November yaitu sebesar 99%, sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 31%. Kondisi kelembapan udara rata-rata di Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 77,275%.

Tabel II.4
Kelembapan Udara Kota Serang Tahun 2023

Bulan	Kelembapan Maksimun, Minimum dan Rata-rata di Kota Serang (Persen)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
Januari	79,30	99,00	47,00
Februari	81,90	99,00	46,00
Maret	81,30	99,00	49,00
April	77,80	98,00	48,00
Mei	79,00	98,00	48,00
Juni	81,20	99,00	53,00
Juli	79,30	99,00	45,00
Agustus	75,00	95,00	45,00
September	68,50	93,00	31,00
Oktober	70,20	92,00	36,00
November	78,40	99,00	44,00
Desember	75,40	98,00	34,00

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data di bawah, penggunaan lahan di Kota Serang pada tahun 2021 hingga 2023 terbagi menjadi wilayah hutan, industri/pergudangan, tanah jasa, tanah perumahan, tanah perusahaan, dan pertanian. Diidentifikasi bahwa guna lahan terbesar pada tahun 2023 adalah untuk tanah perumahan yaitu

seluas 2.594.742,64 m^2. Guna lahan terbesar kedua yaitu hutan seluas 1.773.800 m^2. Adapun guna lahan pertanian yang memiliki luas yang cukup kecil yaitu 733.846,19 m^2. Berikut rincian guna lahan di Kota Serang.

Tabel II.5
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang Tahun 2021 – 2023 (m^2)

Penggunaan	2021	2022	2023
Hutan	1.773.800	1.773.800	1.773.800
Industri/Pergudangan	673.153	79.781	939
Perairan	-	-	-
Tanah Jasa	1.755	47.001	15.726
Tanah Perumahan	622.979	1.602.628	2.594.742,64
Tanah Perusahaan	-	-	-
Pertanian	-	462.343	733.846,19
Kota Serang	**3.071.687**	**3.965.553**	**5.119.054**

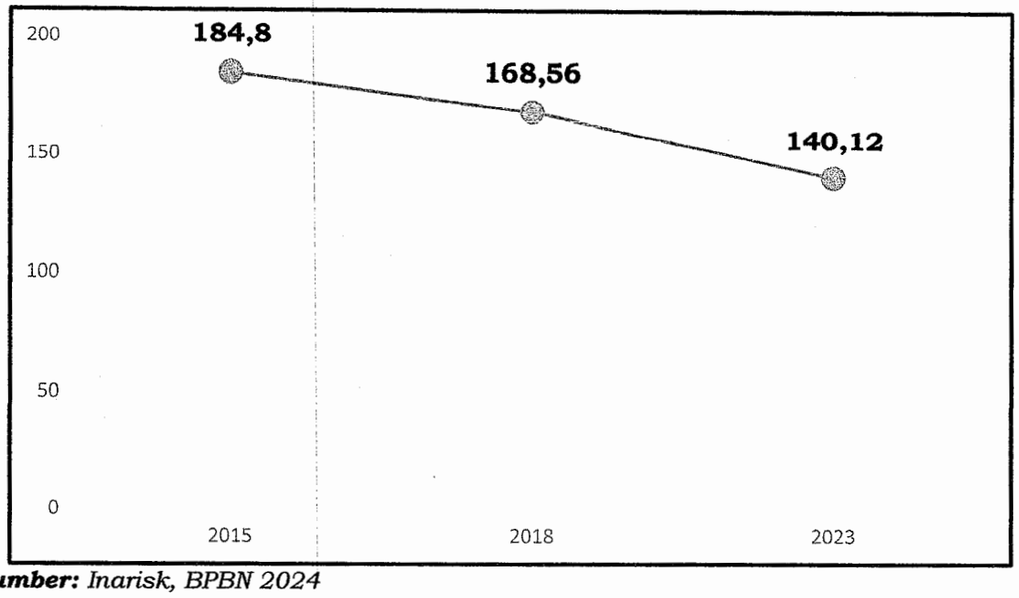
Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Serang memiliki potensi bencana antara lain banjir cuaca ekstream. Gel. Ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, hingga tsunami. Untuk potensi rawan bencana tsunami serta gel. Ekstrim dan abrasi hanya berada di Kecamatan Kasemen. Begitu pula dengan potensi rawan tanah longsor, hanya terjadi di Kecamatan Cipocok jaya dan Kecamatan Taktakan. Sedangkan potensi bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi dan kekeringan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Serang.

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana BPBD Kota Serang meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Adapun risiko bencana di Kota Serang terlihat dari capaian Indeks Risiko Bencana Kota Serang di Tahun 2023 yang menurun hingga 140,12 dari capaian tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 pernah memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 184,8.

Gambar II.3
Indeks Resiko Bencana Kota Serang Tahun 2015-2023



Sumber: *Inarisk, BPBN 2024*

Tabel II.6
Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Kota Serang

Longsor		**Kekeringan**		**Banjir**	
Kecamatan	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**
Curug	Kemanisan	Curug	• Sukajaya • Tinggar • Cilaku • Curug	Curug	• Cilaku • Sukajaya
Cipocok Jaya	•Dalung •Galem	Walantaka	• Kalodran • Kapuren • Teritih	Walakanta	• Pargeragung • Kapuren • Kalodran • Pipitan Kiara
Taktakan	• Sayar • Cilowong	Cipocok Jaya	• Banjar Agung • Banjar Sari • Dalung • Cipocok Jaya • Penancangan	Cipocok Jaya	• Banjar Agung • Penancangan • Cipocok Jaya • Gelam • Banjar Sari
		Serang	• Sukawana • Terondol • Kaligandu • Unyur	Serang	• Terondol • Kaligandu • Lopang • Unyur • Kota Baru • Cipare Cimuncang
		Taktakan	• Taman Baru • Lialang • Cilowong	Taktakan	• Cilowong
		Kasemen	• Sawah Luhur • Bendung • Warung Jaud • Kilasah	Kasemen	• Warung Jaud • Margaluyu • Kasemen • Banten

Longsor		Kekeringan		Banjir	
Kecamatan	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**
			• Terumbu • Priyayi		• Kasunyatan • Kilasah • Masjid Priyayi • Bendung • Sawah Luhur • Terumbu

Sumber: *Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041*

Kelas risiko bencana yang merupakan rangkuman dokumen BPBD Kota Serang dalam menghasilkan kelas risiko untuk potensi bencana di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7

Kelas Risiko Bencana Kota Serang Per Kecamatan

Kecamatan	Kapasitas							
	Banjir	**Cuaca Ekstrem**	**Gel. Ekstrem dan Abrasi**	**Gempa Bumi**	**Kebakaran Hutan dan Lahan**	**Kekeringan**	**Tanah Longsor**	**Tsunami**
Curug	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Walantaka	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Cipocok Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Serang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Taktakan	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Kasemen	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	-	Sedang
Kota Serang	**Tinggi**	**Tinggi**	**Rendah**	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang**	**Rendah**	**Sedang**

Sumber: *Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041*

9. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Serang. Keamanan pangan dan kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Serang.

Berdasarkan capaian pembangunan ketahanan pangan daerah, Kota Serang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang terlihat dari peningkatan ketahanan pangan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan beberapa indikator pangan mengalami progres positif seperti persentase cadangan pangan masyarakat yang mencapai pertumbuhan 13,30 maupun skor

pola pangan harapan yang tumbuh rata-rata 2,5 persen dalam lima tahun terakhir. Adapun secara rinci, gambaran kondisi terkait pembangunan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.8
Indikator Pangan Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	-	24,49	29,07	34,88	34,88	40,00	13,30
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	-	15	15	20	20	45,00	39,6
3	Skor pola pangan harapan	79,00	87,80	87,70	88,65	88,65	88,80	2,5
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	-	15	15	68	68	71,00	89,4
5	Ketersediaan energi dan protein per kapita (kkal/%)	-	2.420; 141.1	2.598; 154.08	2.649; 155.62	2.289; 66.3	2.729; 113,58	3,70; 6,00
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	66,67	85	69	84,60	75,00	5,00
7	Indeks ketahanan pangan	59,16	61,40	61,22	61,24	59,88	71,42	4,1
8	Capaian ketersediaan pangan utama	-				81,72	93,91	

Sumber: *Badan Pangan Nasional, 2023 serta LKJIP DKP3, IKD dan IKK Kota Serang Tahun 2023*

10. Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Serang pada tahun 2023 sebesar 50,61 poin. Capaian ini menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kota Serang pada lingkup kualitas air, tutupan lahan/vegetasi dan udara selama setahun di Kota Serang dalam kategori sedang. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Unit analisis terkecil dalam IKLH Nasional adalah Provinsi. Hal ini berarti bahwa intervensi yang dilakukan harus secara region dan menyeluruh di semua sektor pembangunan.

Adapun penjelasan masing-masing komponen pembentuk IKLH diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kualitas mutu udara tahun 2023 mencapai 65,97 poin. Ini menunjukkan bahwa kualitas udara Kota Serang tahun 2023 mengalami penurunan untuk jumlah poinnya dan statusnya, yaitu dari baik menjadi sedang.

b. Indeks Kualitas Air

Kualitas mutu air tahun 2023 mencapai 50,00 poin, yang mana capaian ini sudah melebihi dari target RPJMD. Tercapainya target dari kualitas mutu air disebabkan karena curah hujan pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, sehingga mempengaruhi hasil pengujian.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 23,26 poin dan masuk ke dalam status sangat kurang baik.

d. Capaian penanganan sampah

Capaian penanganan sampah masih di bawah target RPJMD yakni sebesar 68,15 poin pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya timbulan sampah yang ada dan tidak dibarengi dengan cara penanganannya dimana sarana dan prasarana masih kurang untuk menangani sampah.

Tabel II.9
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Capaian kualitas mutu udara	Poin	67	67,20	72,46	74,136	74,65	65,97
2	Capaian kualitas mutu air	Poin	56	51,05	43,33	53,077	50,00	50,00
3	Capaian kualitas mutu tutupan lahan	Poin	25,32	29,70	39,71	23,14	24,38	23,26
4	Capaian penanganan sampah	Persen	50	55,58	61,6	52,30	55,72	68,15
5	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	47,35	47,35	54,34	55,05	54,37	50,61
6	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	2	4	6.1	14	6.44	9,48

Sumber: *LKJIP Kota Serang, 2023*

11. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dianalisis menggunakan pendekatan ilmiah seperti pendekatan stok, supply-demand, jasa ekosistem, dan lain-lain. Selain dari hasil analisis, daya dukung air juga dapat didekati menggunakan hasil pengukuran seperti volume air PDAM, debit mata air, dan lain-lain.

Dalam analisis DDDTLH juga diperlukan adanya data kebutuhan/konsumsi sumber daya alam sehingga dapat diketahui apakah ketersediaan sumber daya alam mampu mencukupi kebutuhan/konsumsi. Hasil dari analisis DDDTLH berupa gambaran kondisi ketercukupan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan penduduk.

Untuk aspek Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup lahan untuk penyediaan pangan, jika hasil perhitungan $\sigma > 1$, maka Kota Serang mampu swasembada pangan, atau jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk maksimum, jika hasil perhitungan $\sigma=1$, maka Kota Serang memiliki daya dukung lahan pertanian optimal, dan jika hasil perhitungan $\sigma < 1$, Kota Serang tidak mampu swasembada pangan, atau jumlah penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung (Lahan-Pangan)

Salah satu metode pengukuran daya dukung daya tamping pangan adalah dengan menggunakan rumus dari Suhardjo dan Tukiran (1990), yang merupakan konsep gabungan teori Odum, Christeiler, dan Malthus. Rumus ini menghitung daya dukung lahan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan pangan, dan hasil panen atau hasil produksi lahan pertanian per hektar per tahun.

Tabel II.10
Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pangan
Kota Serang Tahun 2018-2023

Parameter	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas lahan panen	Ha	20.493	20.493	20.319	20.461	20.077	15.256
Produksi lahan rata-rata (gabah)	Kg/Ha	5.360	5.490	5.530	6.300	5.400	4.954
Produksi lahan rata-rata (beras)	Kg/Ha	3.216	3.294	3.318	3.780	3.240	2.171
Jumlah penduduk	Jiwa	677.804	688.603	692.101	704.618	720.362	723.794
Kebutuhan fisik minimum	(kg/kapita /thn)	115	115	115	115	115	115
Daya dukung lahan pangan		0,85	0,86	0,85	0.96	0,79	

Sumber: *KLHS RPJPD Kota Serang, 2023*

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tamping lahan-pangan, yang disajikan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Kota Serang tidak mampu swasembada pangan, atau jumlah penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum selama periode 2018-2023.

Kondisi ini berpotensi semakin memburuk mengingat isu strategis daya dukung daya tampung lahan-pangan juga mengalami:

1. Perubahan tata guna lahan pertanian terus terkonversi;
2. Karakteristik tanah di Kota Serang yang tidak terlalu subur;
3. Penurunan kualitas tanah karena pola pemanfaatan selama ini;
4. Iklim yang semakin tidak terprediksi akibat perubahan iklim;
5. Ketersediaan air yang semakin terbatas karena sistem drainase dan pemanfaatan;
6. Teknologi yang dinamis namun sulit diterapkan karena skala ekonomi; dan
7. Kebijakan alih fungsi lahan yang belum implikatif.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung (Air Minum)

Salah satu metode pengukuran daya dukung daya tampung air minum adalah dengan menggunakan rumus dari Suhardjo dan Tukiran (1990), yang merupakan konsep gabungan teori Odum, Christeiler, dan Malthus. Rumus ini menghitung daya dukung air dengan mempertimbangkan Ketersediaan Air (SA) dan Kebutuhan Air (DA) bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah.

Tabel II.11
Daya Dukung dan Daya Tampung Air
Kota Serang Tahun 2018-2022

Parameter	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Air		3.689.553	3.689.553	3.689.553	3.689.553	3.689.553
- SBS	M^3/tahun	412.031	412.031	412.031	412.031	412.031
- Dalung	M^3/tahun	780.362	780.362	780.362	780.362	780.362
- Teritih	M^3/tahun	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580
- IPA Banten	M^3/tahun	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580
- Sindang Heula 1	M^3/tahun					
- Sindang Heula 2	M^3/tahun					
- Waduk Karian	M^3/tahun					
Jumlah Penduduk	Jiwa	677.804	688.603	692.101	704.618	720.362
Koefisien	M^3/jiwa/tahun	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
Kebutuhan air	M^3/tahun	14.843.908	15.080.406	15.157.012	15.431.134	15.775.928
D3TLH		**0,25**	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,23**

Sumber: *KLHS RPJPD, 2022*

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung air domestik Kota Serang, yang disajikan pada tabel 3.73 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kota Serang tidak mampu memenuhi kebutuhan air domestiknya, atau jumlah

penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum selama periode 2018-2022.

Kondisi ini berpotensi semakin memburuk mengingat isu strategis daya dukung daya tampung air domestik juga mengalami:

1. Curah hujan, merupakan sumber air utama untuk kota. Semakin tinggi curah hujan, semakin besar ketersediaan air untuk kota, dan Kota Serang mengalami penurunan jumlah hujan per tahunnya;
2. Pola iklim, seperti musim kemarau dan musim hujan, juga mempengaruhi ketersediaan air. Musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan dan kelangkaan air, fenomena El Nino yang dialami Kota Serang, menyebabkan suhu permukaan laut meningkat, arah angin pasat melemah, curah hujan meningkat di wilayah tropis bagian barat dan selatan namun, menurun di wilayah tropis bagian timur, dan mengakibatkan kekeringan di wilayah tropis bagian timur, banjir di wilayah tropis bagian barat;
3. Topografi, dimana kemiringan lahan dan ketinggian lahan, mempengaruhi ketersediaan air, lahan yang datar dan memiliki ketinggian yang rendah akan lebih mudah untuk memperoleh air, dan Kota Serang berada di posisi topografi yang landai;
4. Kualitas air, juga mempengaruhi ketersediaan air, air permukaan (DAS Cibanten dan Ciwaka) yang tercemar tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, setidaknya untuk dapat dipergunakan, membutuhkan biaya pengolahan yang tidak murah;
5. Jumlah penduduk, yang semakin bertambah akan meningkatkan kebutuhan air;
6. Pola konsumsi air, yang boros akan meningkatkan kebutuhan air yang berlebih dan mengurangi ketersediaan air; dan
7. Pemanfaatan air untuk keperluan industri, pertanian, dan pariwisata juga akan meningkatkan kebutuhan air, semakin banyak aktivitas yang harus dipenuhi, semakin mengurangi ketersediaan air.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Persampahan

Salah satu metode pengukuran daya dukung daya tampung air minum adalah dengan menggunakan rumus dari Suhardjo dan Tukiran (1990), yang merupakan konsep gabungan teori Odum, Christeiler, dan Malthus. Rumus ini menghitung daya dukung sampah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan, dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Tabel II.12
Daya Dukung dan Daya Tampung Sampah
Kota Serang Tahun 2018-2023

Parameter	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapasitas TPA	Ton/Ha	5.193.996	5.193.996	5.193.996	5.193.996	5.193.996	5.193.996
Jumlah timbulan di TPA	Ton/Ha	4.402.814	4.402.814	4.490.723	4.578.632	4.666.541	4.754.450
Jumlah penduduk	Jiwa	677.804	688.603	692.101	704.618	720.362	723.794
Sampah perkapita/thn	Ton/orang/ tahun	0,2738	0,2738	0,2738	0,2738	0,2738	0,3011
D3TLH TPA		**4,26**	**4,20**	**3,71**	**3,19**	**2,67**	**2,02**

Sumber: *KLHS RPJPD, 2023*

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung persampahan Kota Serang yang disajikan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Kota Serang mampu menampung produksi sampah Kota Serang, atau jumlah penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum selama periode 2018-2022, meskipun daya dukung dan daya tampung persampahan khususnya TPA semakin berkurang kemampuan daya tampungnya.

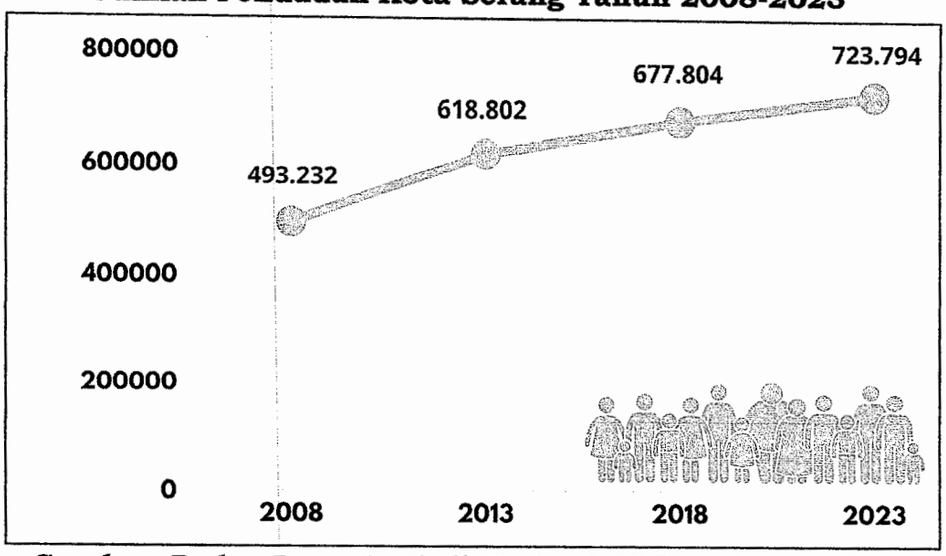
2.1.2 Demografi

Karakteristik demografi khususnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada proses pembangunan. Hal tersebut termasuk jumlah penduduk, kelompok usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran dan kematian, migrasi, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi komposisi populasi. Dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan pembangunan.

1. Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan Kota Serang dapat dilihat dari jumlah penduduk, persentase penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi kependudukan Kota Serang dapat dianalisis dengan melihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.4
Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023



Sumber: *Badan Pusat Statistik RI dan BPS Kota Serang, 2023*

Perkembangan jumlah penduduk Kota Serang yang digambarkan pada grafik tersebut terlihat bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2023, Kota Serang mencatat pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pada tahun 2008, jumlah penduduk mencapai 493.232 jiwa, meningkat menjadi 618.802 pada tahun 2013, kemudian mencapai 677.804 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk tertinggi tercatat pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk meningkat hingga mencapai 723.794 jiwa, menunjukkan dinamika pertumbuhan populasi yang terus berlanjut.

Jumlah penduduk Kota Serang yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, kemudian dibarengi dengan peningkatan kepadatan penduduk yang ada. Peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di suatu wilayah menjadi tantangan dalam melakukan pembangunan.

Di Kota Serang dengan luas wilayah 266,189 km^2, rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2008 yaitu 1.849 jiwa/km. Kepadatan penduduk di Kota Serang mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023, dimana pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.719,19 jiwa/km yang tersebar dalam 6 kecamatan. Dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Serang yaitu terdapat 229.739 jiwa. Adapun informasi perkembangan kependudukan di Kota Serang disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel II.13
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Serang Tahun 2008-2023

Uraian	2008	2013	2018	2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	493.232	618.802	677.804	723.794
Rata-rata Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	1.849	2.320	2.541	2.719
Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	NA	2,06	1,68	2,59
Jenis Kelamin				
a. Laki-Laki	252.181	317.501	347.305	369.567
b. Perempuan	241.051	301.301	330.499	354.227

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

Tabel II.14
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2008-2023

Kecamatan	2008	2013	2018	2023
Kecamatan Curug	42.346	49.181	51.204	60.111
Kecamatan Walantaka	61.451	83.078	94.487	111.022
Kecamatan Cipocok Jaya	62.293	93.081	114.162	103.922
Kecamatan Serang	185.627	217.504	228.563	229.739
Kecamatan Taktakan	63.762	84.106	92.550	106.874
Kecamatan Kasemen	77.753	91.852	96.838	112.126
Kota Serang	**493.232**	**618.802**	**677.804**	**723.794**

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2008-2024*

Penduduk Kota Serang jika dilihat dari tabel di bawah memiliki komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64). Dengan jumlah usia produktif yang mencapai 69,32 persen di tahun 2023, kondisi ini tentunya akan menjadi bonus demografi yang akan berdampak baik bagi pembangunan. Namun alih-alih kuantitas, diperlukan juga kualitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar dapat mencapai tujuan pembangunan. Pengelompokan penduduk sesuai umur secara rinci terdapat pada tabel dibawah.

Tabel II.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2023 (Jiwa)

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	32.073	30.649	62.722
5-9	33.917	32.333	66.250
10-14	33.057	31.408	64.465
15-19	31.754	29.678	61.432
20-24	32.701	30.815	63.516
25-29	33.204	31.837	65.041
30-34	31.974	30.771	62.745

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
35-39	29.853	28.411	58.264
40-44	26.171	24.936	51.107
45-49	23.736	22.947	46.683
50-54	19.965	19.504	39.469
55-59	15.862	15.226	31.088
60-64	11.421	10.962	22.383
65-69	7.527	7.359	14.886
70-74	4.083	4.353	8.436
75+	2.269	3.038	5.307
Jumlah	**369.567**	**354.227**	**723.794**

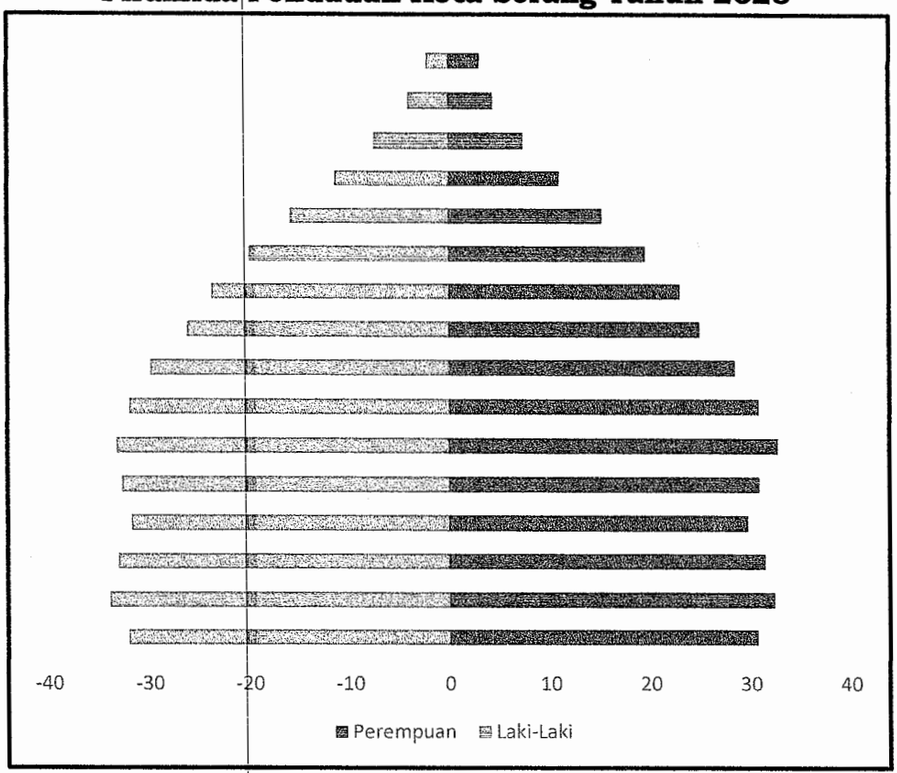
Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

Dari total populasi Kota Serang yang mencapai 723.794 jiwa, mayoritas dihuni oleh penduduk berusia muda dan produktif. Dalam kerangka klasifikasi generasi yang diusung oleh Badan Pusat Statistik, yang meliputi Generasi Baby Boomers (Kelahiran 1946-1964), Generasi X (Kelahiran 1965-1980), Generasi Y atau millennials (Kelahiran 1981-1996) dan generasi Z (Kelahiran 1997-2012) dan generasi Alpha (Kelahiran 2013-2025), dapat disimpulkan bahwa Kota Serang didominasi oleh Generasi Y atau millennials, Gen Z, dan Gen Alpha.

Keadaan demografi ini membuka peluang bagi Kota Serang untuk memanfaatkan penduduk usia produktif melalui adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi penduduk usia produktif yang tinggi guna mengakselerasi pembangunan Kota Serang.

Dalam konteks analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan representasi visual yang menyajikan gambaran awal mengenai struktur umur suatu populasi. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan analisis terhadap produktivitas umur, tetapi juga memberikan pandangan mendalam terkait keberhasilan program kependudukan, terutama program Keluarga Berencana, yang mencerminkan dampaknya pada distribusi usia penduduk.

Gambar II.5
Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2023



Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

Berdasarkan analisis piramida penduduk Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa secara umum, masyarakat di Kota Serang memiliki cukup banyak penduduk usia muda dan sebagian besar berada pada usia produktif. Adapun usia non produktif muda juga cukup mendominasi dibandingkan usia non produktif tua yang sangat kecil jumlah penduduknya.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Serang merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan dinamis. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kesejahteraan perekonomian dan sosial budaya masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja pemerintahan Kota Serang dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

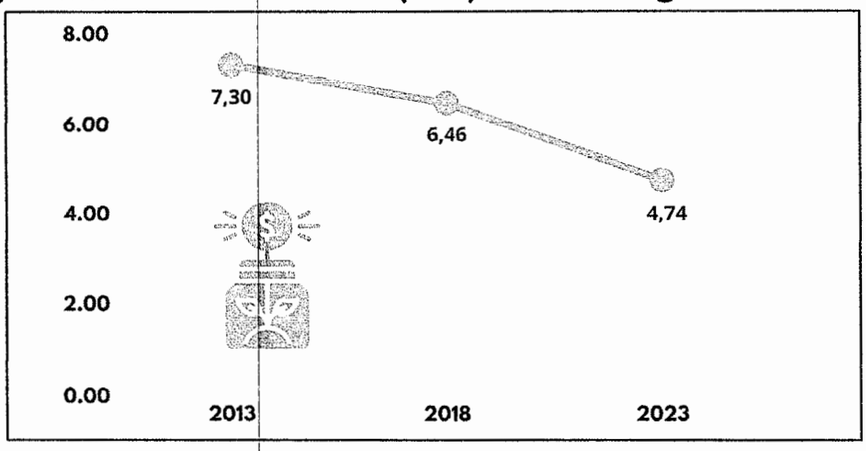
Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisa perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah. Gambaran perekonomian daerah di Kota Serang memberikan pemahaman yang berkaitan

dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, PDRB per kapita, laju inflasi, dan tingkat kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Hal ini mencerminkan pertambahan dalam output ekonomi suatu daerah yang biasanya diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu daerah, yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Gambar II.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: *BPS Kota Serang, 2023*

Perekonomian Kota Serang selama periode 2013 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan perlambatan. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,30%, namun mengalami perlambatan pada tahun 2018 menjadi 6,4%. Hal serupa tercatat pada tahun 2023, di mana pertumbuhan ekonomi kembali melambat hingga mencapai angka 4,74%.

Tabel II.16
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha atau Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang Tahun 2013-2023 (%)

No	Kategori Lapangan Usaha	2013	2018	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,31	1,80	3,66
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,16	0,13	-0,63
3	Industri Pengolahan	8,00	3,13	5,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,78	5,14	2,97
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,06	7,17	5,56
6	Konstruksi	8,78	8,33	2,44

No	Kategori Lapangan Usaha	2013	2018	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	6,28	4,69
8	Transportasi dan Pergudangan	9,24	7,11	5,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,57	6,39	9,01
10	Informasi dan Komunikasi	9,97	9,02	8,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,07	6,25	3,79
12	Real Estate	7,28	6,93	3,65
13	Jasa Perusahaan	8,86	6,20	7,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,10	4,97	-0,02
15	Jasa Pendidikan	5,48	6,59	6,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,44	5,90	7,58
17	Jasa lainnya	7,96	7,15	10,57
Produk Domestik Regional Bruto		**7,30**	**6,46**	**4,74**

Sumber: *BPS Kota Serang, 2023*

Penurunan kasus pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat mobilitas masyarakat kembali normal dan tentunya berpengaruh positif pada kegiatan perekonomian di Kota Serang. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan yang terjadi pada sebagian beberapa lapangan usaha seperti, Jasa Lainnya sebesar 10,57%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,01%; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,11%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,5%; dan Jasa Perusahaan sebesar 7,47%. Sementara itu, terdapat dua kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yakni pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan -0,63% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami pertumbuhan ekonomi -0,02%.

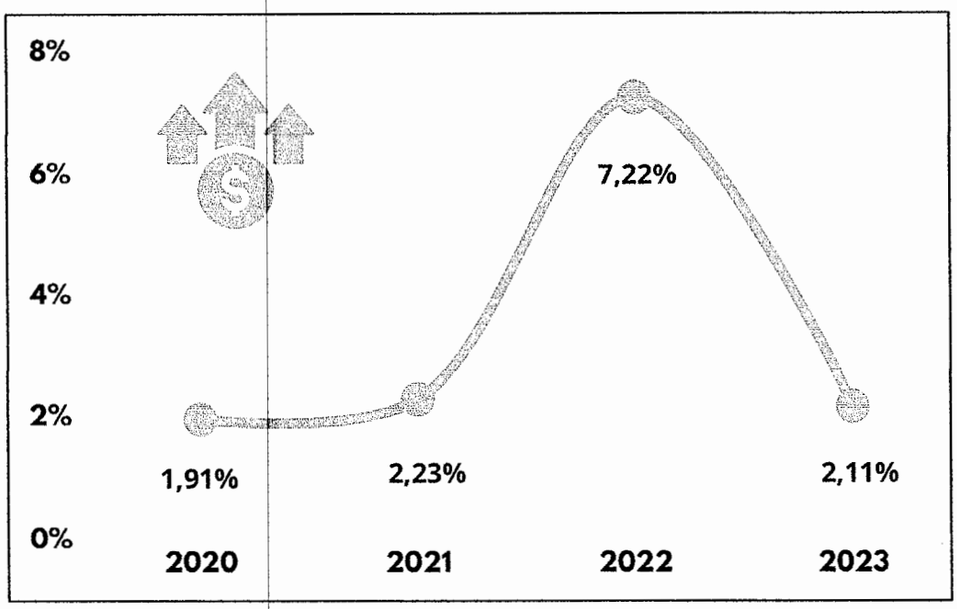
2. Inflasi

Inflasi berkenaan dengan permintaan dan penawaran dari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Inflasi menjadi indikator penting untuk dianalisis karena mampu menunjukkan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat pada momen tertentu. Dengan begitu, analisis inflasi dapat dijadikan sebagai masukan bagi *policy makers* dalam mengendalikan inflasi daerah.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga

barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Gambar II.7
Inflasi di Kota Serang Tahun 2020-2023 (%)



Sumber: *BPS Kota Serang, 2023*

Inflasi Kota Serang mengalami perkembangan tren positif pada tahun 2023. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 7,22% yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 2,11% di tahun 2023. Pola ini mengindikasikan adanya anomali pada tahun 2022 dimana angka inflasi meningkat hingga mencapai 7,22%. Adapun tingkat inflasi yang menjadi andil signifikan dalam peningkatan angka inflasi di Kota Serang adalah kelompok pengeluaran transportasi yang mencapai 2,46% dan makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,16%.

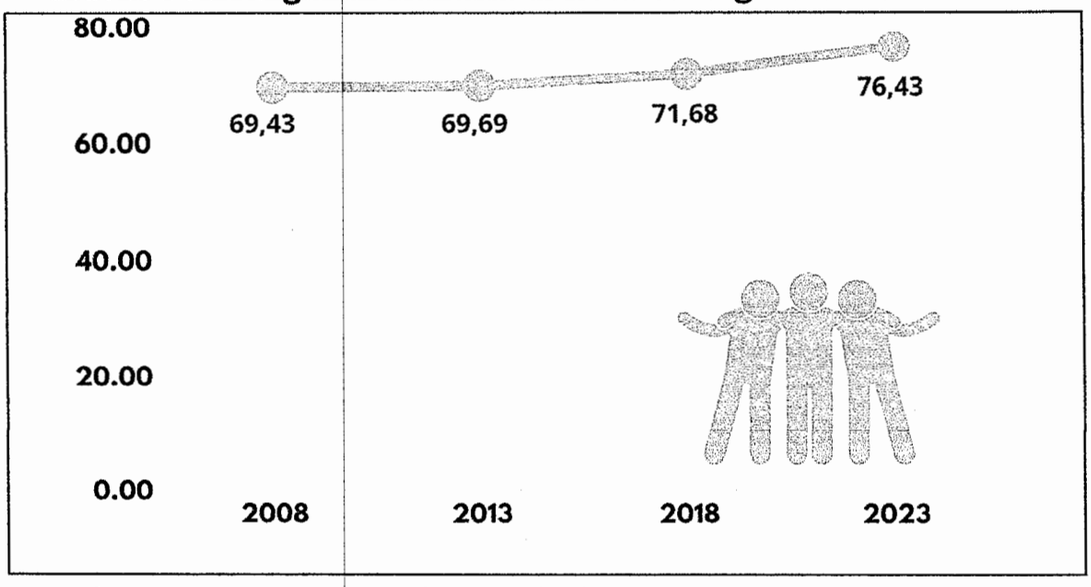
3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan manusia di suatu wilayah. IPM dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan manusia, yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang terdiri dari dimensi harapan hidup yang sehat dan panjang, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Pembangunan manusia menjadi suatu paradigma dimana memposisikan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari upaya pembangunan daerah. Pembangunan manusia ditujukan untuk mencapai penguasaan atas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendapatan hidup yang layak; meningkatkan derajat kesehatan yang dibuktikan dengan

hidup yang panjang dan sehat; meningkatkan pendidikan yang digambarkan melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan ekonomi.

Gambar II.8
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Serang Tahun 2008-2023



Sumber: *BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2024*

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai IPM di Kota Serang dari tahun 2008 sampai tahun 2023 mengalami tren meningkat pada setiap tahunnya. Menurut data BPS, nilai IPM di Kota Serang pada tahun 2008 mencapai 69,43. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan IPM hingga menjadi 69,69. Kemudian pada tahun 2018, IPM mengalami kenaikan yang signifikan hingga berada di angka 71,68 dan meningkat kembali pada tahun 2023 hingga mencapai angka 76,43. Peningkatan IPM di Kota Serang didukung oleh peningkatan setiap komponen penyusunnya (Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.17
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kota Serang Tahun 2008-2023

Indikator	2008	2013	2018	2023
Indeks Pembangunan Manusia	69,43	69,69	71,68	76,43
a. Rata-rata Lama Sekolah	7,01	8,56	8,62	8,91
b. Harapan Lama Sekolah	NA	11,92	12,65	12,82
c. Umur Harapan Hidup*	64,12	67,23	67,58	75,13
d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	NA	11.950	13.261	14.088

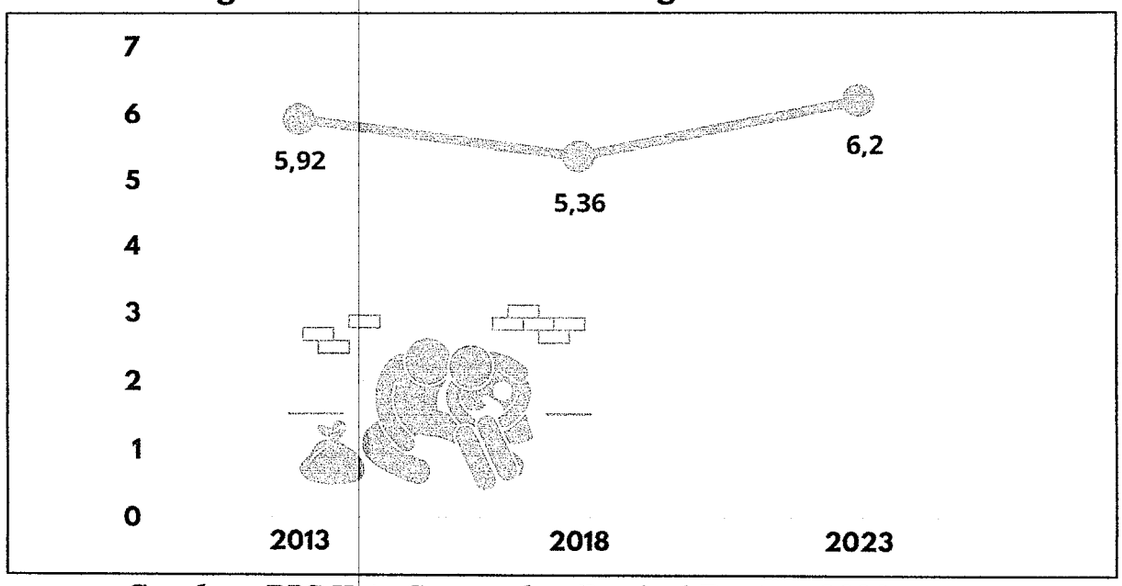
*Ket: *Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020*
Sumber: *BPS Kota Serang, 2023*

Indeks pembangunan manusia di Kota Serang mengalami peningkatan, IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Serang yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin baik. IPM Kota Serang telah mencapai kategori tinggi dengan angka capaian 76,43 pada tahun 2023. Angka tahun 2023 diambil dari komponen penyusun IPM yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 8,91 tahun; harapan lama sekolah sebesar 12,82 tahun; umur harapan hidup sebesar 75,13 tahun; dan pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 14.088 ribu rupiah/kapita/tahun.

4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya terbatas pada persoalan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya finansial. Lebih dari itu, kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang mencakup beragam aspek dan memengaruhi kehidupan seseorang secara menyeluruh. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan persoalan ekonomi, tetapi juga meresap ke dalam bidang pendidikan, kesehatan, akses terhadap pelayanan dasar, dan hak-hak dasar lainnya.

Gambar II.9
Tingkat Kemiskinan Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: *BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2023*

Kemiskinan menjadi tantangan signifikan dalam agenda pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kota Serang. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, tingkat kemiskinan di Kota Serang mengalami penurunan dari 5,92 persen pada tahun 2013 menjadi 5,36 persen pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang mencapai 6,2 persen. Fenomena peningkatan kemiskinan pada tahun 2023 dapat disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga awal 2022 yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi sehingga melahirkan peningkatan angka kemiskinan di Kota Serang.

Meskipun begitu, pemetaan kemiskinan tidak hanya terbatas pada persentase penduduk miskin saja. Melainkan pemerintah perlu mengetahui lebih jauh mengenai tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Serang Tahun 2013-2023

Tahun	Jml Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)
2013	36,70	5,92	0,74	0,16	236.039
2018	36,21	5,36	0,60	0,10	350.237
2023	44,99	6,20	0,75	0,16	511.575

Sumber: *BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Serang menjadi 44,99 ribu jiwa, daripada tahun 2018 yang berjumlah 36,21 ribu jiwa dan tahun 2013 yang berjumlah 36,70 ribu jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa perekonomian di Kota Serang mengalami penurunan performa sebagai dampak pandemi COVID-19 sehingga mempersulit rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Serang mengalami penurunan mencapai sebesar 0,14 poin pada tahun 2018 menjadi 0,60 dibandingkan kondisi di tahun 2013 yang sebesar 0.74. Adapun nilai indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 berada pada angka 0,75. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 0,06 poin mencapai dari 0,16 pada tahun 2013 menjadi 0,10. Sedangkan pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan berada pada angka 0,16.

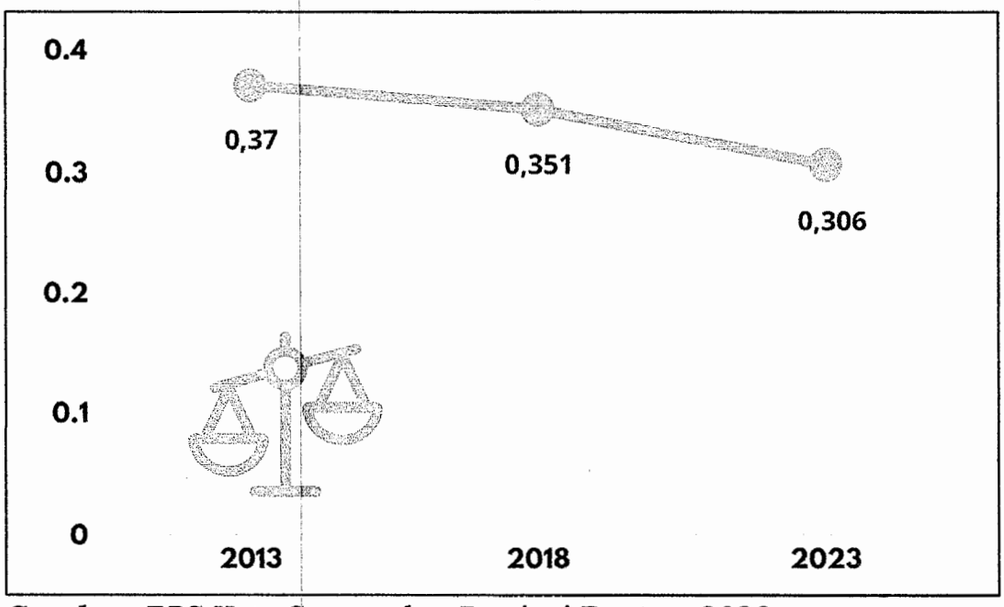
Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan selama periode 2013-2018, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin pada periode tersebut semakin mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin. Begitu pula tingkat

kesenjangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskinnya, yang pada saat bersamaan semakin menyempit, dengan ditandai oleh menurunnya indeks keparahan kemiskinan.

5. Indeks Gini

Indeks gini atau gini ratio merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasar pada distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Ketimpangan ekonomi yang diukur dengan gini ratio akan menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 (nol) atau 0 persen sampai 1 (satu) atau 100 persen. Nilai 0 (nol) menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 (satu) menggambarkan ketidaksetaraan yang sempurna.

Gambar II.10
Indeks Gini Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: *BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2023*

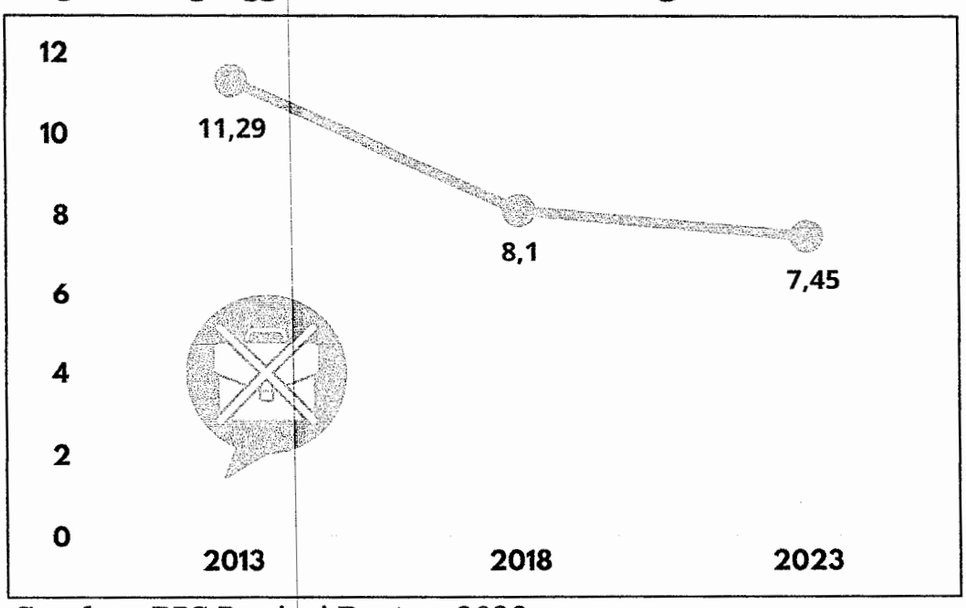
Berdasarkan analisis terhadap grafik di atas, dapat dicatat bahwa pergerakan Indeks Gini Kota Serang menunjukkan tren menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Pada tahun 2013, Indeks Gini mencapai 0,370, dan pada tahun 2023 angka tersebut menurun menjadi 0,306, yang mengindikasikan bahwa Kota Serang mengalami ketimpangan ekonomi dengan kategori sedang dan hampir berada di bawah 0,300 (kategori rendah). Hal ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Serang untuk menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi atau ketidaksetaraan pendapatan di Kota Serang sudah cukup baik.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu indikator signifikan dalam pemantauan kondisi ketenagakerjaan, yang mengukur proporsi dari angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya. Dalam konteks ini, angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja dan mereka yang secara aktif terlibat dalam pencarian pekerjaan.

TPT menjadi cermin dari dinamika pasar tenaga kerja, mencerminkan tingkat ketersediaan lapangan kerja dan kesesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar. Pemahaman mendalam akan TPT memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang efektif.

Gambar II.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang Tahun 2013-2023



Sumber: *BPS Provinsi Banten, 2023*

Berdasarkan analisis grafik yang disajikan, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Serang menunjukkan tren menurun selama periode yang diamati. Pada tahun 2013, capaian TPT Kota Serang berada pada angka 11,29%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 8,1%, dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 7,45%. Dinamika ini mencerminkan tren positif dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kota Serang sehingga pasar kerja mampu menyerap angkatan kerja lebih baik di setiap periode pembangunan.

7. NTP dan NTN

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah suatu indikator ekonomi yang mencerminkan hubungan antara harga yang diterima oleh petani dari hasil

pertanian mereka dengan harga barang-barang yang harus mereka beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. NTP dapat memberikan gambaran tentang daya beli petani dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Tabel II.19
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan
Kota Serang Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	99,49	NA	101,1	98,68	93,98
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	102,94	98,8	95,24	100,00	99,64

Sumber: *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 2023*

NTP Kota Serang pada tahun 2023 mengalami penurunan 4,7 poin dari tahun 2022 yang mencapai 98,68. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani di Kota Serang mengalami penurunan.

Adapun Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan suatu indikator ekonomi yang mengukur tingkat kesejahteraan nelayan di suatu daerah. NTN Kota Serang pada tahun 2023 juga mengalami penurunan 0,36 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 100 poin. Ini artinya kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual nelayan tidak lebih baik dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan di Kota Serang dapat dikatakan belum memperoleh kehidupan yang sejahtera.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan keluarga atau bisa disebut iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk

mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga Kota Serang di tahun 2023 sebesar 53,41 atau masuk dalam kategori yang cukup baik (berkembang). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang masuk dalam wilayah dengan status pembangunan keluarga berkembang.

2. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai dimensi Pembangunan, seperti pendidikan, Kesehatan, dan kehidupan ekonomi. IPG memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang setara dalam masyarakat. Nilai IPG berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketidaksetaraan gender yang lebih rendah.

Tabel II.20
Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender, Kota Serang Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,96	92,28	92,47	92,63	92,49
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	62,10	61,26	61,66	62,39	62,98
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,549	0,508	0,521	0,544	0,530

Sumber: *BPS RI, 2024*

Indeks pembangunan gender menunjukkan penurunan sebesar 0,14 poin di tahun 2023 (92,49) dibandingkan tahun 2021 (92,63). Meskipun menurun, namun capaian IPG di Kota Serang sudah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi cukup kecil untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat dalam mencapai kualitas hidup yang setara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu indeks yang menggambarkan peran dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan dalam parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi. Nilai IDG Kota Serang meningkat 0,59 poin dari tahun 2022 (62,39) menjadi 62,98 di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Kota Serang mulai mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari kondisi ideal.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia

yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, ketimpangan gender di Kota Serang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, IKG Kota Serang sebesar 0,549 dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,508. Namun penurunan ketimpangan ini tidak berlangsung lama dimana pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali IKG menjadi sebesar 0,521 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 0,544. Adapun pada tahun 2023, IKG kembali mengalami penurunan menjadi 0,530 yang mengindikasikan bahwa terjadi penurunan ketimpangan gender dibanding tahun sebelumnya.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, dan struktur tersendiri yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi. Oleh karena itu, potensi ekonomi suatu daerah menjadi kunci utama dalam menentukan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Keunggulan dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayah menjadi landasan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan.

1. Produk Domestik Regional Bruto

Analisis PDRB dapat membantu pemerintah dan pelaku ekonomi setempat untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Dengan memahami struktur ekonomi regional, pihak berwenang dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dan menciptakan program-program pengembangan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah tersebut. PDRB dapat dianalisis dalam dua pendekatan yang berbeda, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Kedua jenis PDRB ini memberikan perspektif yang berbeda terhadap kesejahteraan ekonomi suatu wilayah.

Lebih jelasnya, perhitungan PDRB atas Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun juga sebagai sarana untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB.

Tabel II.21
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)

Kategori PDRB	2013	2018	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.047.312,29	1.627.429,72	2.022.166,94
Pertambangan dan Penggalian	1.380,49	1.807,97	2.008,42
Industri Pengolahan	888.344,26	1.334.704,86	1.812.020,42
Pengadaan Listrik dan Gas	24.001,46	51.252,12	65.703,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.130,79	6.834,20	10.065,04
Konstruksi	3.029.543,74	5.573.700,57	8.094.074,04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.236.686,65	8.133.282,01	10.934.730,24
Transportasi dan Pergudangan	771.216,26	1.390.419,89	2.094.060,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.027.104,62	1.826.407,78	2.429.232,78
Informasi dan Komunikasi	698.811,28	1.130.193,88	1.608.446,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	494.505,43	883.146,00	1.236.756,88
Real Estate	1.548.424,00	2.609.911,27	3.546.602,90
Jasa Perusahaan	151.356,69	266.665,18	342.533,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.107.819,02	1.765.521,60	2.253.728,28
Jasa Pendidikan	728.642,77	1.263.801,64	1.632.655,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	353.175,46	603.416,94	949.283,46
Jasa lainnya	340.165,35	583.218,04	804.301,75
PDRB	**17.452.620,58**	**29.051.713,66**	**39.838.189,82**

Sumber: *BPS Kota Serang, 2024*

Perekonomian Kota Serang memiliki tren meningkat selama periode 2013-2023, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai PDRB yang terus bertambah. Nilai PDRB ADHB pada tahun 2013 memiliki nilai 17.452.620,58 juta rupiah yang kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hingga pada tahun 2023, PDRB ADHB Kota Serang mencapai 39.838.189,82 juta rupiah. Adapun tiga besar kategori lapangan usaha yang berkontribusi pada perekonomian Kota

Serang yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada tahun 2023 memiliki nilai 10.934.730,24 juta rupiah. Diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi dengan kontribusi senilai 8.094.074,04 juta rupiah dan kategori ketiga yaitu lapangan usaha Real Estate yang memiliki nilai sebesar 3.546.602,90 juta rupiah.

Tabel II.22
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Serang Tahun 2013-2023 (%)

No	Kategori	2013	2018	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,00	5,60	5,08
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	5,09	4,59	4,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,18	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,03
6	Konstruksi	17,36	19,19	20,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,01	28,00	27,45
8	Transportasi dan Pergudangan	4,42	4,79	5,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,29	6,10
10	Informasi dan Komunikasi	4,00	3,89	4,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83	3,04	3,10
12	Real Estate	8,87	8,98	8,90
13	Jasa Perusahaan	0,87	0,92	0,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,08	5,66
15	Jasa Pendidikan	4,17	4,35	4,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	2,08	2,38
17	Jasa lainnya	1,95	2,01	2,02
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**

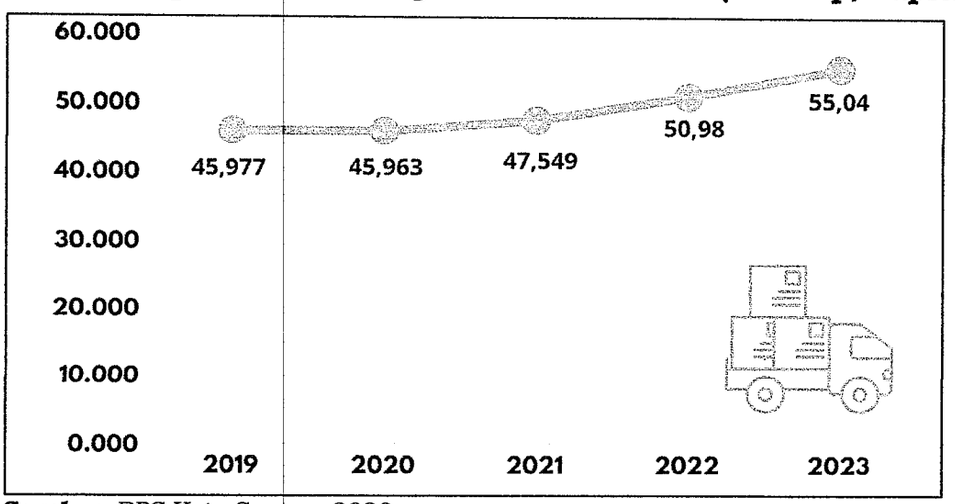
Sumber: *BPS Kota Serang, 2024*

Distribusi PDRB ADHB menggambarkan struktur dan pergeseran jenis lapangan usaha yang sedang mendominasi suatu daerah. Kota Serang selama ini memiliki keunggulan ekonomi di sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Lapangan Usaha Konstruksi, dan sektor Lapangan Usaha Real Estate. Ketiga kategori lapangan usaha tersebut, memiliki dominasi dalam membentuk struktur ekonomi di Kota Serang selama pelaksanaan pembangunan ini.

2. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Gambar II.12
PDRB per Kapita Kota Serang Tahun 2019-2023 (Juta Rp/Kapita)



Sumber: *BPS Kota Serang, 2023*

PDRB per kapita Kota Serang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020, yaitu dari 45,977 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 45,963 juta rupiah pada tahun 2020, namun PDRB per kapita kembali tumbuh pada tahun 2021 mencapai 47,549 juta rupiah. Pada tahun 2022, PDRB Kota Serang mencapai 50,98 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 3,431 juta dibandingkan tahun 2021 dan meningkat kembali hingga mencapai titik tertinggi selama lima tahun terakhir yakni sebesar 55,04 juta rupiah.

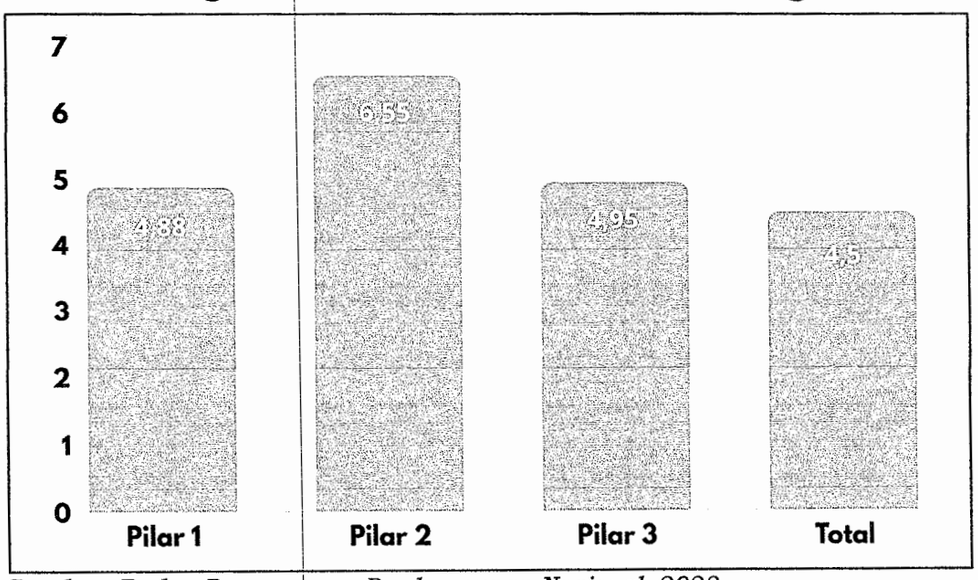
3. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif memiliki tujuan untuk mendukung pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan

dan inklusif, yang memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin penduduk. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dapat diukur melalui berbagai pilar atau dimensi yang mencerminkan karakteristik inklusivitas ekonomi. Bappenas menggunakan tiga pilar untuk mengukur Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, tiga pilar tersebut yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan yang ketiga perluasan akses dan kesempatan.

Adapun Indeks Perkembangan Ekonomi Inklusif Kota Serang tahun 2021 memiliki nilai 4,50. Lebih rinci pada pilar pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Kota Serang mendapatkan nilai 4,88. Kemudian pada pilar kedua yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan memperoleh nilai 6,55, dan pada pilar ketiga yaitu perluasan akses dan kesempatan, Kota Serang mendapatkan nilai 4,95.

Gambar II.13
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Serang Tahun 2021



Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023*

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi komponen dari masyarakat yang berperan penting dalam mencapai pembangunan daerah. berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompetensi unggul.

1. Indeks Pendidikan

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait

kompetensi masyarakat Kota Serang. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Indeks Pendidikan.

Indeks pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pendidikan di suatu wilayah. Berbagai indikator dapat digunakan dalam menyusun indeks pendidikan. Adapun indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Serang untuk mengukur indeks pendidikan di Kota Serang yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Tabel II.23
Indeks Pendidikan Kota Serang Tahun 2020-2023

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,76	8,89	8,90	8,91
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,78	12,79	12,81	12,82
3	Indeks Pendidikan	Poin	64,70	65,16	65,25	65,31

Sumber: *BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2024, diolah*

Terlihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah mengalami kenaikan pada setiap tahun yang diamati. Pada tahun 2023, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Serang mencapai 8,91 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas 3 SMP. Adapun harapan lama sekolah menunjukkan angka 12,82 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk baru lahir di Kota Serang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga lulus SMA. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Serang tentunya juga berdampak pada peningkatan indeks pendidikan Kota Serang dimana pada tahun 2023 mencapai 65,31.

2. Indeks Kesehatan

Bidang kesehatan juga menjadi komponen pembentuk sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat melalui capaian Angka Harapan Hidup

(AHH). Indikator ini merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang dapat mencerminkan gambaran umur yang mungkin akan dicapai oleh seorang bayi baru lahir. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel II.24
Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan di Kota Serang Tahun 2020-2023

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,54	74,84	75,13
2	Indeks Kesehatan	Poin	83,74	83,91	84,37	84,82

Sumber: *BPS Kota Serang dan Provinsi Banten, 2024, diolah*

Adapun capaian angka harapan hidup di Kota Serang pada tahun 2023 mencapai 75,13 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 75-76 tahun. Adapun indeks kesehatan juga memiliki capaian cukup tinggi hingga mencapai 84,82 pada tahun 2023.

3. Angka Literasi dan Numerasi

Angka literasi numerasi, atau kemampuan dalam membaca dan memahami informasi numerik, memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing sumber daya manusia. Meningkatkan angka literasi numerasi di masyarakat dapat mendukung perkembangan pribadi individu, dan juga berkontribusi pada peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Tabel II.25
Angka Literasi dan Numerasi untuk Satuan Pendidikan dan Peserta Didik di Kota Serang Tahun 2021-2023

Indikator		2021	2022	2023
Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Literasi Membaca	15,83	21,35	29,68
	Numerasi	2,9	8,03	21,02
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Literasi Membaca	27,69	36,47	52,16
	Numerasi	45,81	50,88	58,56

Sumber: *Bappeda Kota Serang, 2023*

Angka literasi dan numerasi Kota Serang menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Angka tersebut setiap tahunnya dilaporkan melalui rapor pendidikan untuk melihat kompetensi SDM di kota Serang terutama untuk di tingkat SD dan SMP. Persentase peserta didik

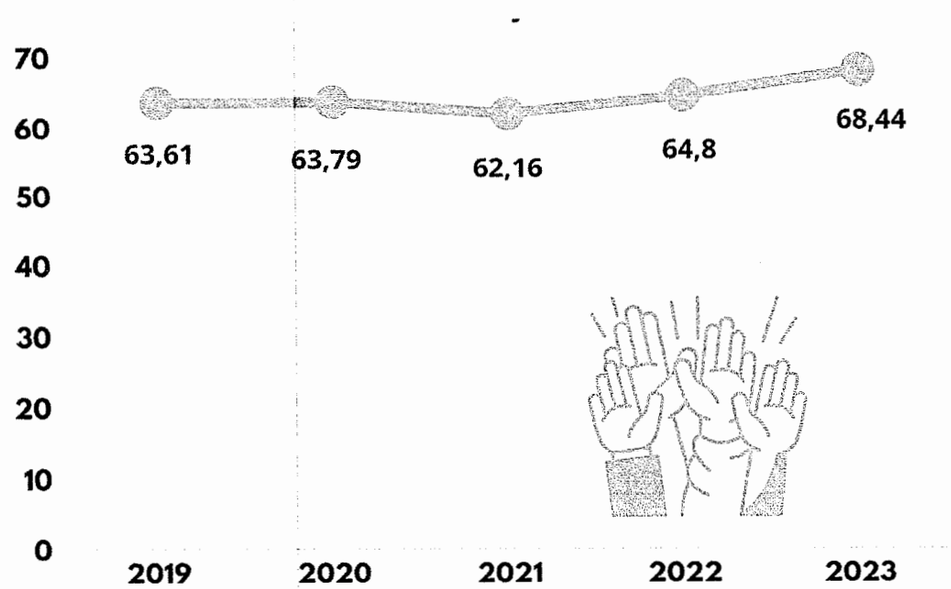
yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca pada tahun 2021 tercatat di angka 27,69 persen, kemudian naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 52,16 persen. Sedangkan pada numerasi meningkat dari 45,81 persen pada tahun 2021 menjadi 58,96 persen pada tahun 2023.

Pada indikator persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca pada tahun 2021 tercatat angka sebesar 15,83 persen, kemudian naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 29,68 persen. Sedangkan pada numerasi meningkat dari 2,9 persen pada tahun 2021 menjadi 21,02 persen pada tahun 2023.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki dampak signifikan terhadap daya saing sumber daya manusia pada suatu wilayah. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif.

Gambar II.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Serang Tahun 2019-2023



Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Serang, 2023*

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Serang memiliki tren yang cukup baik selama lima tahun terakhir walaupun pada tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan. Dimulai pada tahun 2019 sebesar 63,61 dan di tahun terakhir mencapai 68,44 pada tahun 2023. Kondisi tingkat partisipasi

angkatan kerja yang meningkat menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik walaupun demikian tetap perlu adanya kebijakan stimulus dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat kedepannya.

5. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menggambarkan hubungan antara jumlah orang yang tidak bekerja dengan jumlah orang yang sedang bekerja atau yang dapat bekerja. Jumlah orang tidak bekerja biasanya mencakup anak-anak (di bawah usia produktif) dan orang lanjut usia (di atas usia produktif). Jumlah orang yang bekerja melibatkan mereka yang berada dalam usia produktif, yang secara umum dianggap antara 15 dan 64 tahun. Rasio ini dapat mempengaruhi produktivitas dan potensi pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi faktor penting dalam menilai daya saing sumber manusia di Kota Serang.

Tabel II.26
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)
0 – 14 tahun	193.437
15 – 64 tahun	501.728
>65 tahun	28.629
Angka ketergantungan	44,26

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

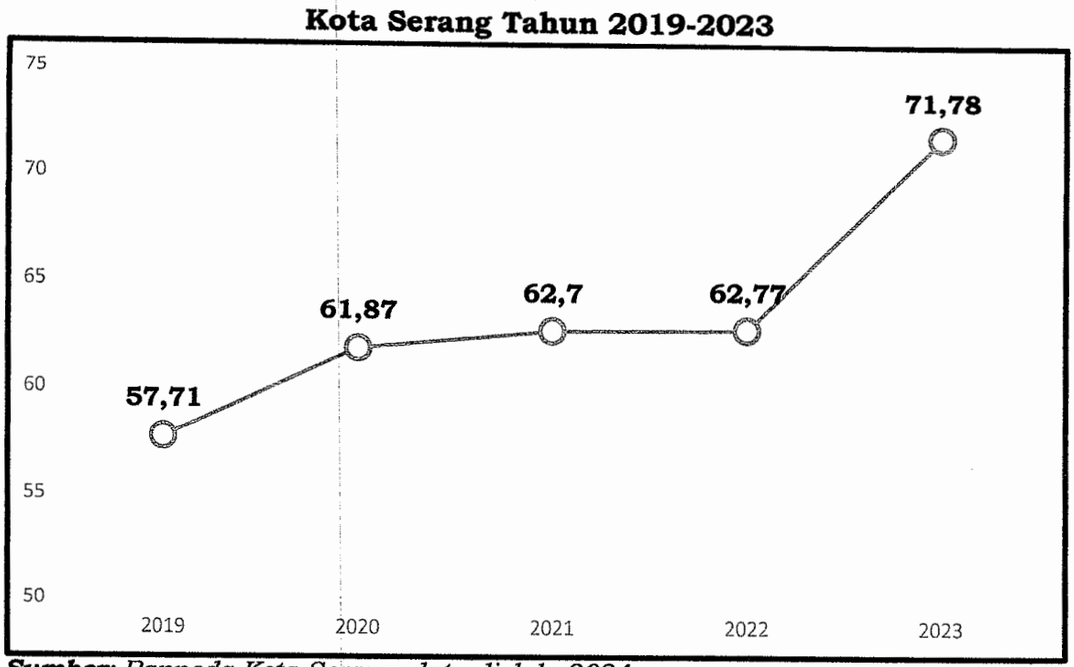
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, Kota Serang memiliki 501.728 jiwa penduduk usia produktif dan 222.066 jiwa usia non-produktif, baik itu penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) maupun penduduk usia tidak lagi produktif atau lansia (65 tahun ke atas). Dari jumlah kependudukan tersebut, rasio ketergantungan Kota Serang yaitu sebanyak 44,26 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif, terdapat 44-45 penduduk usia non produktif yang ditanggung beban kehidupannya.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Untuk menilai kualitas infrastruktur di Kota Serang, setiap tahunnya Kota Serang menghitung Indikator Kualitas Layanan

Infrastruktur untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kota Serang.

Gambar II.15
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Kota Serang Tahun 2019-2023



***Sumber**: Bappeda Kota Serang, data diolah, 2024*

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang menunjukkan kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Di tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang menunjukkan angka 71,78 atau masuk kategori puas. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Serang semakin puas dengan layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang baik kondisi dan pelayanan infrastruktur pendidikan, kesehatan, maupun prasarana dasar.

1. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merujuk pada fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung proses pembelajaran dan pengajaran di institusi pendidikan. Ini mencakup bangunan, peralatan, sumber daya manusia, dan sistem administrasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan produktif. Kondisi ideal ini diharapkan mampu memberikan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia.

Tabel II.27
Kondisi Infrastruktur Pendidikan Kota Serang Tahun 2023

Indikator	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
Jumlah Sekolah (unit)	289	147	106
Jumlah Guru (guru)	3.927	2.462	2.440
Jumlah Murid (siswa)	84.309	35.450	36.345

***Sumber:** Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2024*

Kondisi infrastruktur pendidikan di Kota Serang saat ini, terdapat 263 unit sekolah dasar dengan tenaga pengajar sebanyak 3.927 guru; 147 unit sekolah menengah pertama dengan tenaga pengajar sebanyak 2.462 guru; dan 106 unit sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan dengan tenaga pengajar sebanyak 2.440 guru.

2. Infrastruktur Kesehatan

Perkembangan infrastruktur kesehatan yang berupa rumah sakit dan puskesmas cenderung stabil dalam kurun waktu mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Jumlah rumah sakit sebanyak 10 pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang kemudian berkembang menjadi 11 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit kembali bertambah menjadi 12, sedangkan pada tahun 2023 jumlah rumah sakit berkurang menjadi 11 unit. Jumlah puskesmas sepanjang tahun 2019 hingga 2023 tetap stabil berjumlah 16.

Tabel II.28
Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	10	10	11	12	11
	Jumlah Puskesmas	16	16	16	16	16
Jumlah Tenaga Kesehatan						
2	Jumlah Dokter	40	40	616	623	785
	Jumlah Perawat	82	70	1050	1050	85
	Jumlah Bidan	154	141	567	567	275
	Jumlah Farmasi	12	12	567	567	31
	Jumlah Ahli Gizi	12	12	203	203	NA

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2019-2024*

Peningkatan yang signifikan terjadi pada jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2020. Dimana jumlah dokter yang awalnya sebanyak 40 orang meningkat menjadi 616 pada tahun 2021, menjadi 623 pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 785 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah perawat, bidan, farmasi, dan ahli gizi di Kota Serang sepanjang tahun 2019 hingga 2022, namun pada tahun 2023 jumlah perawat, bidan, farmasi, dan ahli gizi mengalami penurunan.

3. Infrastruktur Prasarana Dasar

Sarana prasarana pembangunan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau negara.

Tabel II.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pekerjaan Umum							
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	65,3	65,5	65,85	71,83	70,59	49,07
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,03	0,032	0,05	0,03	0,07	0,57
Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	71.804	71,804	71,804	93,69	69	71.804
Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	89,98	91	90,43	94,94	97	98,59
tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	23	26	28	31	16	32,99
Penataan Ruang							
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit	Persen	47	47	47	47	47	47
Ketaatan terhadap RTRW	Persen	55	51	51	52	57	56,00
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	NA	0,00596	0,00688	7,5	3,04	3,07

Sumber: *IKK Kota Serang, 2024*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya meningkat. Seperti pada indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, terjadi peningkatan capaian pada tahun 2023. Penurunan ruang terbuka hijau ini tentunya dapat menimbulkan potensi permasalahan lingkungan. Selain itu, pada indikator persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak terjadi perubahan capaian pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kondisi drainase di Kota Serang tidak mengalami perubahan kualitas.

Pembangunan perumahan dan pemukiman terus dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Serang secara optimal. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun cakupan kegiatannya antara lain, yaitu penanganan rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga yang menggunakan listrik, penanganan pemukiman yang

tertata, penanganan lingkungan pemukiman kumuh, rasio rumah dan pemukiman layak huni. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh, yang dilakukan dengan meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

Tabel II.30
Capaian Indikator Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,867	0,871	0,871	0,874	0,878
2	Rasio pemukiman layak huni	Rasio	0,992	0,955	0,965	0,966	0,97
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	86,7	66,32	87,11	87,44	87,80
4	Persentase pemukiman tertata	Persen	99,19	93,18	96,57	96,58	97,01
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	6,82	6,5	6,08	2,52	4,10
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	1,44	2	2,71	0,56	4,10
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	13,3	2,8	5,69	5,69	3,72
8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	79,27	69,33	88,75	78	70,00
9	Persentase penduduk berakses air bersih	Persen	38,95	39,63	43,44	53,44	57,42
10	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Per 1000	1048,09	1037,56	927,66	927,66	1.037.56

Sumber: *IKK Kota Serang, 2023*

Adapun Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPPTL) menggambarkan total biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan listrik dalam kurun waktu tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah). Nilai ini merepresentasikan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk konsumsi listrik (dalam kilowatt-hour atau kWh), yang bisa dipengaruhi oleh tarif listrik per kWh dan jumlah konsumsi listrik itu sendiri. Berdasarkan data di tabel, terlihat adanya peningkatan bertahap dalam konsumsi listrik (kWh) dan RPPTL dari tahun 2019 hingga 2023. Konsumsi listrik meningkat dari 579,6 juta kWh pada tahun 2019 menjadi 699,6 juta kWh di tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan sekitar 20,7%. Seiring dengan itu, RPTTL juga mengalami kenaikan dari Rp639 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp808 triliun pada tahun 2023, atau meningkat sekitar 26,4%. Kenaikan ini mungkin mencerminkan peningkatan tarif listrik atau penggunaan listrik yang lebih tinggi oleh konsumen. Kenaikan

terbesar terlihat pada tahun 2023, baik dalam konsumsi maupun RPPTL, yang dapat menandakan adanya lonjakan penggunaan atau penyesuaian tarif listrik di tahun tersebut.

Tabel II.31
Pemakaian Tenaga Listrik Kota Serang Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Tahun	Pemakaian (KWh)	Pemakaian RPPTL (Rp)
2019	579.629.003	639.046.566.111
2020	619.667.128	623.481.422.154
2021	634.364.947	661.190.318.678
2022	647.753.455	734.029.389.336
2023	699.684.653	807.991.601.070

Sumber: *PT. PLN Kota Serang, 2023*

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah. Iklim investasi biasanya dipengaruhi oleh angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Investasi terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

1. Investasi dan Perijinan

Pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator makro yang penting. Investasi atau penanaman modal memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah yang menjadi magnet bagi investasi memiliki peluang besar untuk mengalami perkembangan yang pesat.

Kota Serang mempunyai posisi yang strategis di sekitar wilayah metropolitan Jakarta. Lokasi yang dekat dengan pusat bisnis dan aksesibilitas yang baik tentunya dapat menjadi daya tarik bagi investor yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi di Kota Serang. Jumlah arus kas bersih aktivitas investasi di Kota Serang pada tahun 2022 sebesar Rp216.956.069.707,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.701.896.472,00 atau 11,68 persen dari tahun 2021. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.32
Posisi Arus Kas Aktivitas Investasi TA 2021 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Pendapatan penjualan atas tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan penjualan atas peralatan dan mesin	0,00	19.720.000,00	(19.720.000,00)	0,00
Pendapatan penjualan atas Gedung dan bangunan	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari penjualan aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari penjualan aset lainnya	0,00	270.748.894,00	(270.748.894,00)	0,00
Jumlah arus kas masuk	**17.200.000,00**	**290.468.894,00**	**(273.268.894,00)**	**0,00**
Arus Kas Keluar:				
Perolehan tanah	834.377.600,00	2.557.713.360,00	(1.723.335.760,00)	(67,38)
Perolehan peralatan dan mesin	39.232.751.365,00	47.432.138.118,00	(8.199.386.753,00)	(17,29)
Perolehan Gedung dan Bangunan	41.237.542.334,00	57.957.932.938,00	(16.720.390.604,00)	(28,85)
Perolehan jalan, irigasi dan jaringan	127.257.403.784,00	71.820.656.982,00	55.436.746.802,00	77,19
Perolehan aset tetap lainnya	10.809.516.232,00	11.228.098.288,00	(418.582.056,00)	(3,73)
Perolehan Aset Lainnya	476.840.000,00	0,00	476.840.000,00	0,00
Pembentukan dana cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan modal pemerintah daerah	0,00	9.999.998.915,00	(9.999.998.915,00)	0,00
Jumlah arus keluar	**236.098.431.315,00**	**217.246.538.601,00**	**18.851.892.714,00**	**8,68**
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi	**(236.081.231.315,00)**	**(216.956.069.707,00)**	**(19.125.161.608,00)**	**8,82**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang, 2022*

Investasi jangka panjang pada tahun 2022 sebesar Rp9.999.998.915,00 merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Serang ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Investasi Pemerintah daerah kepada PT. Bank BJB dalam bentuk investasi langsung berupa penyertaan modal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank BJB ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00. Dalam penganggarannya penyertaan modal dibagi menjadi dua tahap yakni dimulai dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan tahap selanjutnya untuk pemenuhan penyertaan modal yang dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar Rp15.000.000.000,00.

Selain itu, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Serang telah menerima hibah aset yang berasal dari PT. Tirta Serang Madani, yang sebelumnya merupakan investasi perusahaan Malaysia yang bergerak dalam bidang pelayanan pemrosesan air bersih yang berlokasi di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, sebagaimana tercantum dalam Akta Serah Terima Aset PT. Tirta Serang Madani Kepada Pemerintah Kota Serang Nomor 49 tanggal 23 Desember 2021. Aset yang dihibahkan berupa tanah seluas 2.852 m^2 beserta bangunan diatasnya dalam bentuk gedung dan bangunan berupa instalasi air.

Berkaitan dengan investasi, kemudahan perizinan merupakan salah satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap daya saing investasi suatu daerah. Kemudahan perizinan dalam proses urusan persoalan investasi seperti tidak memerlukan waktu yang lama, persyaratan dokumen yang mudah serta biaya yang terjangkau. Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Proses kemudahan perizinan di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut:

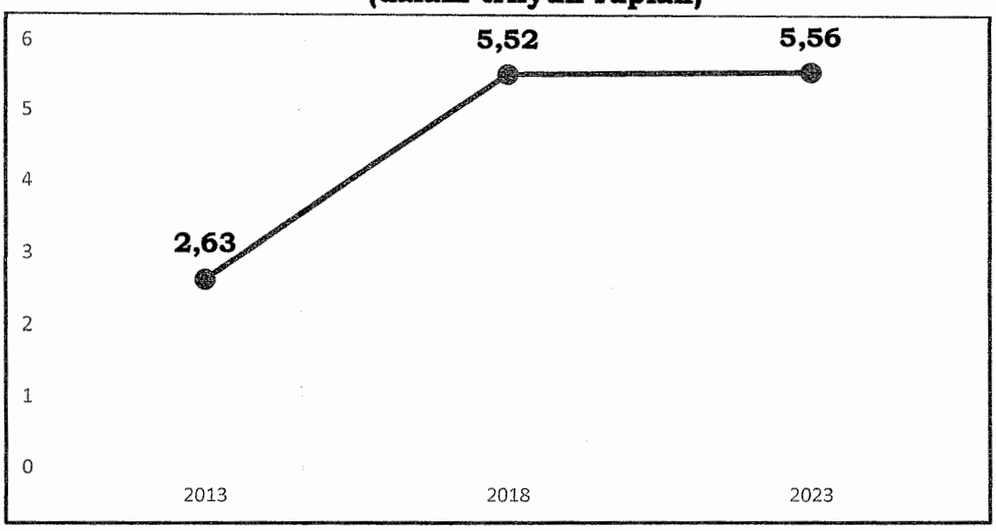
Tabel II.33
Lama Proses Perizinan Kota Serang

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dok)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rph)
1	SIUP	hari	sudah OSS	Gratis
2	TDP	Hari	sudah OSS	Gratis
3	IUI	Hari	sudah OSS	Gratis
4	TDI	Hari	sudah OSS	Gratis

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dok)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rph)
5	IMB	7 hari		L x Index X HSB untuk Semua IMB 1. Sektor IMB Rumah Tinggal. Jasa. Sosial Budaya 2. Khusus Tempat Ibadah Rp = 0

Sumber: *DPMPTSP Kota Serang, 2023*

Gambar II.16
Nilai Total Investasi di Kota Serang Tahun 2013-2023
(dalam trilyun rupiah)



Sumber*: Bappeda Kota Serang, data diolah, 2023*

Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata pertumbuhan investasi di Kota Serang mencapai 17 persen. Sedangkan nilai investasi yang ditanamkan di Kota Serang pada tahun 2023 mencapai Rp5.568.325.102.524,00. Nilai investasi ini meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2013 yang pada saat itu memiliki nilai investasi di Kota Serang sebesar Rp2.631.707.634.615,00.

2. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi keamanannya. Perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 2018-2023 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.34
Angka Kriminalitas Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	65	98	107	87	82
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	4	0	0	1	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	2	0	0	40	NA
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	82	87	25	109	NA
5	Jumlah Kasus Pencurian	278	327	70	119	253
6	Jumlah Kasus Penipuan	75	99	23	34	-
7	Jumlah Kasus Pemalsuan uang	1	0	0	0	NA
8	Jumlah Kasus Penggelapan	21	49	8	20	-
9	Lainnya	NA	NA	NA	63	5
10	Total Tindak Kriminal Selama 1 tahun	532	762	251	473	342
11	Jumlah Penduduk	652.192	681.012	702.228	724.552	723.794
	Angka Kriminalitas	**8.16**	**11.19**	**3.57**	**6,52**	**4,72**

Sumber: *Polres Kota Serang, 2023*

Secara umum, terjadi peningkatan kondisi keamanan di Kota Serang dalam lima tahun terakhir, khususnya pada tahun 2021 yang memiliki angka kriminalitas terendah dalam lima tahun terakhir. Adapun angka kriminalitas pada tahun 2019 mencapai 8,16 dan meningkat hingga 11,19 di tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada angka kriminalitas di Kota Serang hingga mencapai tingkat kejahatan 3-4 kasus di setiap 100.000 penduduk, meskipun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 6,52 per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi penurunan kembali angka kriminalitas menjadi 4,72 per 100.000 penduduk.

Dari sisi kerukunan masyarakat, tercermin dari indeks kerukunan umat beragama. Indikator ini mencerminkan bagaimana hubungan antaragama terjalin, meliputi aspek toleransi, kerja sama, dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Pada tahun 2019, Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 88,00 dengan kategori rukun sangat tinggi. Walaupun menurun pada tahun 2023 menjadi 85,80 namun tetap berada di kategori rukun sangat tinggi. Hal tersebut perlu dipertahankan dengan kerja sama baik dari pemerintahan serta masyarakat.

Tabel II.35
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Serang
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	88,00	85,00	89,00	86,05	85,80

Sumber: *Kementerian Agama Kota Serang, 2023*

3. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.36
Jumlah Demonstrasi di Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Jenis Demonstrasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bidang Politik	3	8	26	0	0	1
2	Ekonomi	8	13	-	0	0	4
3	Kasus Pemogokan Kerja	2	-	10	0	0	2
4	Bidang Agama	4	-	12	0	0	-
5	Lainnya	5	5	85	105	6	10
	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	**22**	**26**	**133**	**105**	**6**	**17**

Sumber: *Polres Serang Kota, 2024*

Pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah demonstrasi. Sebagian besar demonstrasi terjadi di KP3B, DPRD, dan Ciceri. Demonstrasi yang sering terjadi mengenai ekonomi dan lainnya berkaitan dengan demonstrasi buruh biasanya menuntut kenaikan upah minimum regional sedangkan demonstrasi yang berkaitan politik, kasus pemogokan kerja dan bidang agama tidak terlalu signifikan terjadi di Kota Serang.

4. Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah merupakan iuran wajib daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jumlah insentif pajak yang mendukung investasi di Kota Serang pada tahun 2021 sebesar Rp222.535.674,00, sedangkan retribusi daerah merupakan

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu oleh pemerintah daerah. Kota Serang menghasilkan retribusi yang mendukung iklim ekonomi sebanyak Rp1.976.679.093,00 pada tahun 2020.

Tabel II.37
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pajak yang dikeluarkan (Rp Juta)	129.994.111.102	145.581.543.385	139.179.329.606	143.125.000.000	42.176.353.437	192.901.866.052
Jumlah Insentif Pajak yang Mendukung Iklim Investasi	-	-	-	222.535.674	-	-
Jumlah Retribusi yang Dikeluarkan (Rp Juta)	8.560.072.708	13.732.010.605	15.346.436.105	36.099.200.000	27.965.103.050	8.835.467.587
Jumlah Retribusi yang Mendukung Iklim Investasi	-	-	1.976.679.093	-	-	-

Sumber: *SIPD Kota Serang, 2024*

5. Peraturan Daerah

Peraturan Derah berperan sangat penting terhadap jalannya aktivitas perekonomian, salah satunya iklim usaha. Peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yaitu berkaitan dengan perizinan, terkait lalu lintas barang dan jasa, terkait ketenagakerjaan, Berikut tabel yang menampilkan jumlah perda yang mendukung iklim usaha tahun 2018-2022.

Tabel II.38
Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Kota Serang Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda terkait Perijinan	13	13	14	14	1	1
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	5	5	5	5	1	-
3	Jumlah Perda terkait Ketenagakerjaan	1	1	1	1	0	-

Sumber: *SIPD Kota Serang, 2024*

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan di Kota Serang dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

1. Kepuasan Masyarakat

Pemerintah Kota Serang telah mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61-88,30.

Tabel II.39
Nilai IKM Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,80	77,74	77,68	78,61	82,29
Indeks Pelayanan Publik	-	-	2,83	3,49	3,65

Sumber: *LKE IRB, LKJIP Kota Serang, 2022*

Capaian indeks kepuasan masyarakat di Kota Serang semakin meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 82,29 pada tahun 2023. Selain itu, kualitas pelayanan publik Kota Serang menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2023. Dimana di tahun 2023 kualitas pelayanan publik Kota Serang sebesar 3,65 yang merupakan peningkatan indeks pelayanan publik pada beberapa tahun terakhir.

2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

Hasil evaluasi AKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2023 adalah 60,02 atau kategori B. Peningkatan ini menjadikan Kota Serang mengalami kenaikan kategori capaian akuntabilitas kinerja dari CC menjadi B. Meskipun begitu, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Serang masih belum berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Tabel II.40
Capaian Realisasi AKIP Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP	54,64	55,33	58,68	59,04	60,02
Kategori AKIP	CC	CC	CC	CC	B

Sumber: *LKJIP Kota Serang, 2023*

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian PAN dan BR melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kota Serang. Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 telah membawa perubahan dalam implementasi tata kelola pemerintahan.

Tabel II.41
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	59,18	58,30	57,69	60,91	70,97
Kategori IRB	CC	CC	CC	B	BB

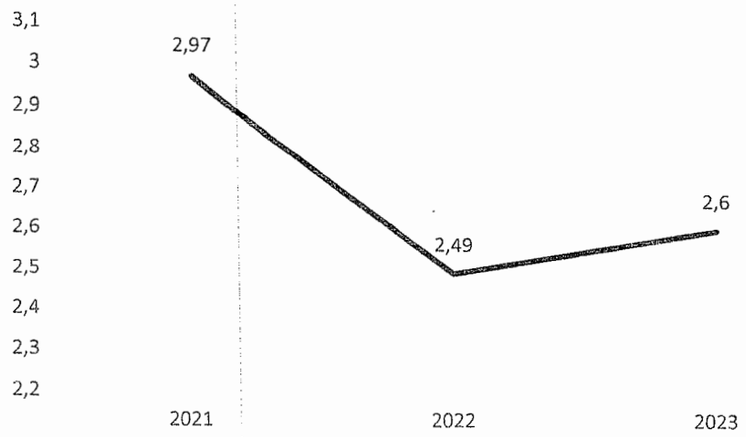
Sumber: *LKJIP Kota Serang, 2023*

Capaian indeks reformasi birokrasi dengan predikat B diperoleh pada tahun 2022 (60,91) dan meningkat signifikan di tahun 2023 menjadi 70,97 dengan kategori BB. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Serang menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Meskipun masih terdapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Serang, tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik baik kepada masyarakat maupun internal pemerintah merupakan salah satu akselerator dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi berbagai pelayanan dan kinerja dalam era reformasi birokrasi saat ini. Dalam melihat capaian implementasi digitalisasi pemerintahan, maka dirumuskan Indeks SPBE yang merupakan ukuran untuk mengevaluasi dan memantau implementasi *e-Government* di seluruh elemen pemerintah pusat maupun daerah.

Gambar II.17
Capaian Indeks SPBE Kota Serang Tahun 2021 – 2023



Sumber: *LKJIP Kota Serang, 2023*

Capaian kinerja terkait *e-Government* di Kota Serang masih belum terlihat progres positifnya dimana pencapaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021. Terlebih pada tahun 2022, Indeks SPBE juga menurun cukup drastis hingga 2,49. Kondisi ini tentu memerlukan adanya akselerasi dalam mewujudkan implementasi digitalisasi kinerja Pemerintah Kota Serang pada kebijakan pembangunan yang akan datang.

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SERANG TAHUN 2008-2025

Pemerintah Kota Serang melaksanakan evaluasi berkenaan dengan pembangunan jangka panjang sebagai upaya dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan ke depan yang maju dan berkelanjutan. Evaluasi ini dilaksanakan di seluruh periode pembangunan dimana pada tahap terakhir dilakukan evaluasi hingga tahun 2022. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang tersebut, Kota Serang memiliki visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 adalah:

"Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025"

Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang Kota Serang dengan rincian sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berkualitas dan berdaya saing.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang mandiri, unggul dan berdaya saing.

Misi 3: Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang berkualitas.

Misi 4: Mewujudkan keserasian tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan yang asri.

Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, transparan dan berwibawa.

Dokumen RPJPD Tahun 2008-2025 Kota Serang masih bersifat kualitatif, sehingga untuk mengetahui kondisi ketercapaian pembangunan digunakan pendekatan kondisi indikator makro. Kondisi capaian kinerja indikator makro Kota Serang tahun 2008 sebagai awal periode RPJPD.

Tabel II.42
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Serang
Tahun 2008-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan	Capaian pada Tahun Kinerja (2023)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Status
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,99 (2008)	76,43	12,41	Pertumbuhan Positif
2	Angka kemiskinan	6,19 (2008)	6,20	0,16	Pertumbuhan Positif
3	Angka pengangguran	17,55 (2009)	7,45	-57,54	Pertumbuhan Positif
4	Pertumbuhan ekonomi	5,63 (2008)	4,74	-15,81	Pertumbuhan Negatif
5	PDRB per kapita (jt rupiah)	8,83 (2008)	55,04	523,33	Pertumbuhan Positif
6	Ketimpangan pendapatan	0,398 (2016)	0,306	-23,12	Pertumbuhan Positif

Sumber: *Evaluasi RPJPD Kota Serang 2008-2025*

Berdasarkan data yang disajikan, tergambar bahwa dari enam capaian indikator makro, terdapat satu indikator yang menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu pada Pertumbuhan Ekonomi. Adapun pada Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, PDRB per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan menunjukkan peningkatan yang positif. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan tren positif dimana dari 67,99 pada tahun awal periode perencanaan menjadi 72,98 pada tahun 2022. Tren positif juga ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan yang meningkat dari 6,19 pada tahun 2008 menjadi 5,94 pada tahun 2022. Angka pengangguran menunjukkan penurunan capaian yang dapat diartikan menjadi pertumbuhan positif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai penurunan capaian yang diartikan sebagai pertumbuhan negatif, pada capaian tahun kinerja 2022 sebesar 4,71 yang turun sebanyak 16,34 persen dari capaian pada awal tahun perencanaan. PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2022.

Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2008-2013, tahap kedua pada periode 2014-2018, tahap ketiga pada periode 2018-2023, dan tahap keempat pada periode 2024-2026. Kriteria penilaian realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut.

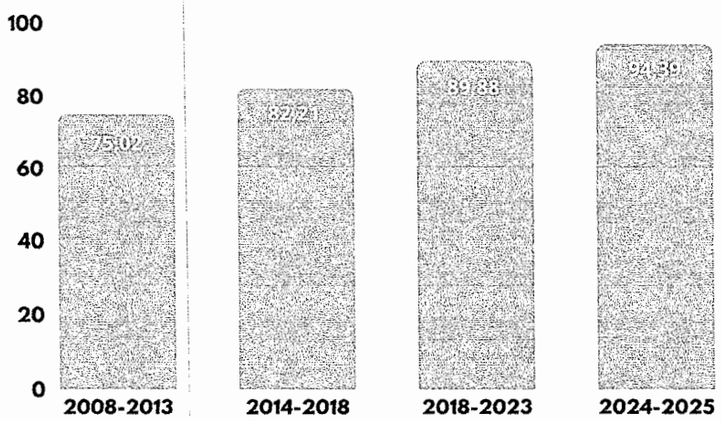
Tabel II.43
Kriteria Penilaian Kinerja

No	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66 ≤ 75%
4	Rendah	51 ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Hasil dari evaluasi penilaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD menunjukkan mayoritas indikator memiliki predikat penilaian "TINGGI". Indikator dengan predikat ini berada pada kisaran 85,37 persen dari total keseluruhan indikator di tiap periode RPJMD Kota Serang.

Gambar II.18
Rata-rata Hasil Capaian Kinerja RPJPD Tiap Periode RPJMD Kota Serang



Sumber: *Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Serang, 2008-2025*

Jika dirata-rata, tingkat capaian kinerja RPJMD akan menghasilkan persentase sebagai berikut. Untuk periode I, rata-rata capaian kinerja indikator

berada pada angka 75,02% dimana masuk predikat Tinggi. Sementara itu, terjadi peningkatan pada capaian kinerja RPJMD periode II, rata-rata capaian kinerja indikator berada pada angka 82,21% dimana masuk predikat Tinggi, dan terus meningkat hingga periode III yaitu sebesar 89,88% dengan predikat Tinggi. Pada periode IV, kembali terjadi peningkatan capaian kinerja RPJMD menjadi 94,39%.

Sebagaimana hasil rata-rata capaian kinerja tiap periode, adapun faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembangunan RPJPD Kota Serang berdasarkan tiap periode tahapan, antara lain sebagai berikut:

Tabel II.44
Periode I RPJPD (RPJMD Tahun 2008-2013)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan	
• Program penataan administrasi kependudukan berjalan lancar dibarengi kesadaran masyarakat	
Infrastruktur Berkelanjutan	
• Program peningkatan jalan terlaksana dengan baik	• Belum optimalnya jumlah sarana penghubung • Belum adanya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan • Belum optimalnya pengelolaan air bersih
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
• Program pengembangan wawasan kebangsaan berjalan efektif • Program pengembangan peran kepemudaan dan manajemen olahraga berjalan dengan baik • Adanya peningkatan sarana prasarana sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif	
Perekonomian	
• Adanya peningkatan produksi perikanan	• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan • Kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti kelompok budidaya • Belum optimalnya kompetensi SDM • Kurangnya promosi pariwisata • Belum optimalnya pengelolaan koperasi

Tabel II.45
Periode II RPJPD (RPJMD Tahun 2014-2018)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan	
• Program penertiban administrasi kependudukan terlaksana dengan baik • Adanya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan • Adanya program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah • Adanya upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik • Terdapat program perbaikan sistem administrasi kearsipan • Upaya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan berjalan dengan optimal	• Belum adanya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan • Upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak terealisasi dengan baik
Infrastruktur Berkelanjutan	
• Adanya ketersediaan dokumen perencanaan yang diperlukan maupun perijinan yang diharuskan/berlaku	• Adanya permasalahan administrasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan • Program perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tidak optimal • Integrasi aplikasi layanan e-government dan aplikasi layanan publik tidak terealisasi dengan baik • Adanya permasalahan administrasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan • Fasilitasi dan koordinasi perencanaan drainase tidak berjalan dengan baik • Perbaikan sarana irigasi dan pengaturan pengairan tidak berjalan secara optimal • Upaya membangun fasilitas sarana sanitasi tidak terealisasi dengan baik • Kurangnya penerapan program penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat • Program penyediaan dan pengelolaan air tidak berjalan dengan optimal • Program pengelolaan areal pemakaman tidak berjalan dengan optimal • Membangun, memelihara, dan mendayagunakan taman kota / RTH

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	sebagai ruang publik yang memiliki nilai guna tinggi bagi pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat tidak berjalan dengan optimal • Kurangnya penataan dan pengembangan perumahan serta permukiman layak bagi masyarakat • Proses pengelolaan siklus air berkelanjutan serta penyusunan kerangka aturan dan perencanaan strategis pada pengelolaan aset, operasi dan pemeliharaan, pengelolaan sanitasi belum berjalan dengan baik
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
• Penuntasan buta aksara berjalan dengan maksimal • Adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung partisipasi peserta didik • Adanya fasilitasi secara bertahap kebutuhan gedung perpustakaan • Adanya peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat dan pengembangan sistem kesehatan • Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) • Adanya upaya perlindungan anak dan perempuan yang bekerja secara optimal • Terlatihnya perempuan di pedesaan bidang usaha ekonomi produktif • Adanya implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat • Adanya peningkatan pelestarian dan pemahaman nilai-nilai tradisional • Adanya pengembangan potensi dan prestasi melalui pembinaan organisasi	• Terdapatnya pekerjaan yang gagal lelang, seperti pada Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. • Masih kurangnya tenaga pendidik/guru khususnya yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal • Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah atas • Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat di bidang kesehatan belum berjalan dengan optimal • Tidak optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak • Pelaksanaan imunisasi belum berjalan dengan optimal • Belum optimalnya program mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat • Peningkatan keberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tidak berjalan secara menyeluruh

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	• Kurangnya penertiban administrasi kependudukan khususnya pembuatan akta kelahiran • Tidak adanya upaya melakukan pembinaan secara rutin dan pelatihan secara bertahap kepada kader perempuan. • Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait peran perempuan dalam lembaga swasta • Kurangnya minat terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat • Kurangnya upaya pembangunan sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat • Peningkatan upaya penegakan hukum tidak optimal • Pembinaan kelembagaan masyarakat belum berjalan dengan optimal • Pengembangan prestasi pemuda belum dibarengi dengan peningkatan jumlah organisasi olahraga • Peningkatan potensi dan prestasi pemuda dengan mengadakan kegiatan event belum berjalan dengan optimal
Perekonomian	
• Dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan padat karya, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha baru serta layanan perkantoran • Pembinaan maupun pendataan sinergitas hubungan industrial terlaksana dengan baik • Adanya upaya melakukan pembinaan kepada pedagang pasar serta melakukan peningkatan SDM yang tidak stabil • Pemantapan sistem agribisnis pertanian dan perikanan • Adanya upaya pengembangan inkubator bisnis UMKM dan Koperasi • Adanya pemantapan kinerja pemangku kepentingan	• Belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian • Belum maksimalnya identifikasi, pengumpulan data dan analisis data produksi dan data pengeluaran pangan serta data cadangan pangan kota. • Upaya peningkatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi belum terealisasikan dengan baik

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
pariwisata; Pengembangan kelembagaan pariwisata; Penataan destinasi pariwisata • Adanya peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing	

Tabel II.46
Periode III RPJDP (RPJMD Tahun 2018-2023)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan	
Sistem pelaporan dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah berjalan dengan baik	• Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih tidak berjalan dengan optimal • Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik serta Pengembangan budaya organisasi berorientasi pelayan tidak dijalankan secara berkesinambungan • Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik kurang dimanfaatkan • Pemantapan profesionalitas aparatur didukung oleh penataan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan tidak optimal
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
• Upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan telah terlaksana dengan baik	• Upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan tidak berjalan dengan optimal • Belum optimalnya penuntasan wajib belajar dua belas tahun • Belum optimalnya peningkatan kualitas lembaga formal dan nonformal serta peningkatan pendidikan berbasis kompetensi belum berjalan dengan baik
Perekonomian	
• Upaya memperluas kerja sama investasi dan pemantapan kompetensi dan daya saing tenaga kerja berjalan secara optimal	• Belum adanya konsistensi dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan dan daya saing perekonomian • Tidak berjalannya pemantapan unsur tripartit dalam meningkatkan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	• Pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri belum berjalan dengan optimal. Ini berdampak pada peningkatan kualitas, daya saing serta kehandalan UMKM dan Koperasi • Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dan peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat tidak berjalan secara efektif • Upaya pengembangan industri kecil dan pemantapan sistem agribisnis tidak terealisasi dengan baik
Infrastruktur Berkelanjutan	
• Adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan	• Percepatan pembangunan dan pemerataan prasarana, sarana dan fasilitas kota tidak berjalan dengan optimal • Belum adanya peningkatan perilaku ramah lingkungan di lingkungan masyarakat • Tidak adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya dalam penanganan timbunan sampah • Belum berjalannya pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang dengan baik

Tabel II.47
Periode IV RPJPD (RPJMD Tahun 2024-2026)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata Kelola Pemerintahan	
	• Upaya pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih belum terealisasikan dengan baik dan berkelanjutan • Belum optimalnya penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem, prosedur, serta standarisasi kualitas pelayan serta budaya organisasi • Penanaman budaya taat hukum di masyarakat khususnya pada budaya korupsi belum terealisasi dengan baik • Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya terealisasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
• Adanya upaya pemantapan daya saing sumber daya manusia dengan adanya program penuntasan wajib belajar dua belas tahun; perintisan wajib belajar lima belas tahun; peningkatan pendidikan keterampilan IPTEK • Telah berjalannya pengembangan dan penguatan sistem kesehatan dengan optimal • Pembangunan sudah melibatkan partisipasi kepemudaan dan perempuan	• Upaya pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gender belum terealisasi dengan baik
Perekonomian	
• Berjalannya jaminan sosial pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin • Adanya program pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja	• Perkuatan potensi industri strategis tidak berjalan secara efektif • Pemantapan sistem agribisnis pertanian serta pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tidak ditindaklanjuti dengan baik • Tidak adanya program Perluasan jaringan perdagangan luar negeri • Tidak adanya program pengungkit jasa real estate dan konstruksi • Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata; Pengembangan kelembagaan pariwisata; penataan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	destinasi pariwisata tidak diimplementasikan dengan baik • Tidak optimalnya pendayagunaan potensi lokal dan pengembangan UMKM serta koperasi • Belum optimalnya pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja • Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan keluarga belum terealisasi dengan baik
Infrastruktur Berkelanjutan	
	• Kurangnya pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang • Kurangnya upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan

Dari hasil analisis dan evaluasi kebijakan maupun capaian hasil pelaksanaan pembangunan jangka Panjang Kota Serang, maka kesimpulan dari evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang yang dijabarkan dalam poin-poin kesimpulan berikut ini:

1. Pelaksanaan tahapan RPJPD Kota Serang telah dilaksanakan selama empat tahapan dan saat ini sedang masa pembangunan tahap IV yakni RPD Kota Serang 2024-2026.
2. Terdapat empat komponen visi dalam RPJPD yakni komponen visi terkait terdepan pendidikan (IPM) terdepan jasa (kontribusi sektor jasa), terdepan perdagangan (kontribusi sektor perdagangan), dan Serang SMART (LPE).
3. Capaian makro Kota Serang mengalami peningkatan positif dari tahun dasar 2008. Dari lima indikator antara lain IPM, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita serta Indeks Gini, hanya terdapat satu indikator yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang mengalami perlambatan dimana di tahun 2008 data awal sebesar 5,63%, sedangkan di tahun 2022 sebesar 4,71 dengan pertumbuhan -16,34 persen. Hal ini dikarenakan Covid-19 yang melanda seluruh wilayah sehingga membuat perekonomian di

hampir semua daerah turun drastis. Sedangkan Capaian tertinggi adalah PDRB per kapita dengan data awal 8,83 juta rupiah per kapita mengalami pertumbuhan 477,24% dengan realisasi 50,97 juta rupiah per kapita.

4. Sasaran pokok Kota Serang diukur menggunakan 4 periode RPJMD antara lain: RPJMD tahun 2008-2013, RPJMD 2014-2018, RPJMD 2018-2023 serta RPD 2024-2026
5. Pada periode I RPJMD (2008-2013), memiliki capaian sebesar 75,02 persen dengan kategori Tinggi. Indikator yang memiliki capaian cukup rendah terkait Jumlah Pembinaan kelompok budidaya ikan/nelayan, Persentase cakupan pelayanan air bersih, Luas wilayah kebanjiran dan Luas wilayah kumuh.
6. Pembangunan di Tahap ke II (2014-2018) memiliki capaian sebesar 82,21 persen dengan kategori Tinggi. Indikator yang memiliki capaian cukup rendah terkait Angka Kematian Bayi, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Persentase penanganan PMKS, Persentase Anak memiliki Akta Lahir, Luas irigasi Kota dalam kondisi baik dan luas RTH.
7. Sedangkan pada tahap III, terjadi Pandemi COVID-19 yang merupakan permasalahan global sehingga terjadi gejolak perekonomian dan sosial masyarakat yang menyebabkan berbagai capaian pembangunan tidak optimal, namun capaian periode ke III sebesar 89,88% dengan kategori Tinggi.
8. Tahun 2025 akan memiliki rata-rata capaian pembangunan sebesar 94,39%. Indikator pembangunan yang memiliki capaian Sedang yakni LPE Sektor Jasa, Real Estate dan Konstruksi.
9. Kota Serang masih memiliki sisa 3 tahun untuk mengejar ketertinggalan pencapaian pembangunan ekonomi di sektor Jasa, Real Estate dan Konstruksi.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan kesimpulan evaluasi RPJMD ini akan menyempurnakan kekurangan pada perumusan dokumen perencanaan, utamanya perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai dokumen induk bagi daerah. Rekomendasi yang tepat sasaran dan memiliki relevansi yang positif akan memberikan dampak signifikan dalam pencapaian setiap sasaran pembangunan daerah karena semakin terarah dan efektif dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan. Berikut rekomendasi dari hasil evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang:

1. Optimalisasi dalam peningkatan perekonomian terutama di sektor unggulan Serang yaitu Sektor Jasa, *Real Estate* dan Konstruksi.
2. Kondusivitas wilayah serta upaya pemerintah dengan menyediakan kemudahan perizinan dengan adanya Mal Pelayanan Publik, diharapkan dapat meningkatkan potensi investasi di Kota Serang.
3. Perlu adanya kebijakan khusus dalam meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian daerah mengingat sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan daerah Kota Serang.
4. Perlu adanya sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan sekaligus mengoptimalkan dan mengefektifkan setiap penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik dari skala kelurahan hingga perangkat daerah
5. Dengan adanya fokus anggaran pada komponen visi terkait peningkatan ekonomi sektor perdagangan dan jasa, diharapkan pencapaian visi "TERDEPAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, JASA, DAN PERDAGANGAN MENUJU KOTA SERANG *SMART* 2025".

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

Dalam demografi terdapat aspek kependudukan yang statis dan dinamis sifatnya. Aspek statis ditunjukkan oleh komposisi penduduk misalnya. Komposisi penduduk merupakan gambaran kondisi penduduk pada suatu titik tertentu, yaitu pada saat dilaksanakan sensus atau survei. Sesudah tanggal atau hari tersebut, komposisi penduduk akan berubah. Perubahan komposisi ini terjadi karena perubahan kelahiran, kematian dan migrasi. Jadi dalam demografi juga dipelajari aspek statis dan aspek dinamis, yang keduanya saling mempengaruhi.

Demografi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan sarana (infrastruktur) suatu wilayah atau negara. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas masyarakat tidak lepas dari penggunaan sarana pembangunan baik transportasi, perumahan hingga air minum. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana pembangunan menjadi salah satu domain utama perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Pada konteks pembangunan suatu wilayah, demografi dan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang mendasar. Poin penting terkait hubungan demografi dan perencanaan pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya pelayanan, kebijakan sosial ekonomi hingga ketenagakerjaan. Dengan memahami struktur demografi, pemerintah daerah dapat menilai sektor mana yang memerlukan perhatian lebih secara spasial maupun perencanaan ke depan, misalnya, pendidikan untuk populasi muda, layanan kesehatan untuk populasi tua, atau peluang kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada pembangunan infrastruktur, kondisi demografi mempengaruhi perencanaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola migrasi akan memengaruhi bagaimana infrastruktur harus diperluas atau ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis demografi sangat membantu dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk infrastruktur baru dan menilai kapasitas yang diperlukan.

Dari sisi sosial ekonomi, kondisi demografi memiliki peran cukup tinggi dalam perencanaan keluarga dan kebijakan populasi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur usia penduduk dapat memengaruhi perencanaan ekonomi. Populasi muda yang besar dapat diarahkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan populasi tua memerlukan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Data demografi juga membantu dalam merancang kebijakan sosial, seperti program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Informasi ini membantu pemerintah dalam menentukan siapa yang memerlukan dukungan paling besar.

Demografi memengaruhi pasokan tenaga kerja suatu wilayah, khususnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan peluang kerja untuk populasi yang bertambah. Dalam hal ini, perencanaan harus memerhatikan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pelatihan juga harus

disesuaikan dengan profil demografi untuk memastikan tenaga kerja yang produktif.

Kota Serang didominasi oleh sektor ekonomi perdagangan, konstruksi, dan *real estate*, sektor ini memiliki cukup banyak serapan tenaga kerja sehingga perlunya perencanaan yang komprehensif dengan aspek kependudukan, khususnya bagaimana peningkatan kompetensi angkatan kerja yang mampu diserap oleh lapangan usaha berdasarkan *skill*/keterampilan yang tersedia.

Tabel II.48
Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232

***Sumber**: Proyeksi Penduduk BPS Kota Serang, diolah*

Penduduk Kota Serang diproyeksikan mencapai 926.232 jiwa pada tahun 2045, Angka ini meningkat kisaran 202.438 jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kota Serang jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya, Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetitivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kota Serang dalam menyejahterakan kehidupannya.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kota Serang didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Pada tahun 2025, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 104,07 dan terus menurun hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 100,83. Adanya penurunan rasio jenis kelamin mendekati angka 100 ini mengindikasikan semakin berimbangnya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah proyeksi penduduk menurut jenis kelamin di Kota Serang hingga tahun 2045.

Tabel II.49
Proyeksi Penduduk Kota Serang 2025-2045 berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	369.567	380.210	405.069	427.671	447.733	465.027
Perempuan	354.227	365.347	391.999	417.117	440.332	461.205
Sex Ratio	104,33	104,07	103,33	102,53	101,68	100,83

***Sumber**: Proyeksi Penduduk BPS Kota Serang, diolah*

Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi.

Salah satu fenomena yang terlihat pada proyeksi penduduk di Kota Serang adalah peningkatan penduduk usia tua yang pada momen tertentu akan menjadi *aging population*. Fenomena ini terlihat dari semakin melebarnya struktur umur pada piramida bagian atas yang mengindikasikan usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi. Adapun penduduk usia muda mengalami penurunan dari awal pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045.

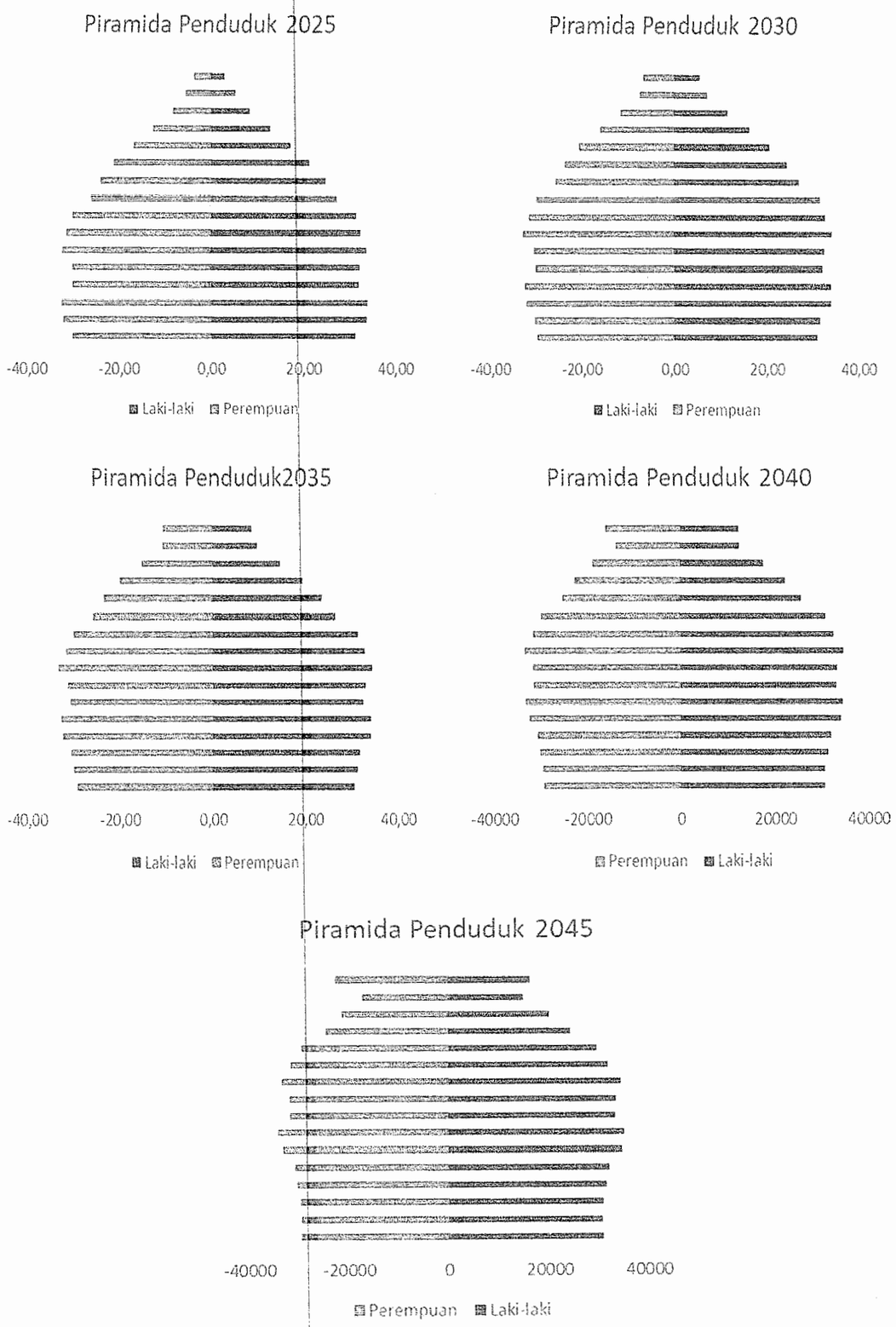
Tabel II.50
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang

PARAMETER	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Komposisi Umur (Jiwa)						
0-14	193.437	193.241	188.555	183.144	181.651	181.567
15-64	501.728	518.562	558.654	592.334	615.407	632.024
65+	28.629	33.754	49.859	69.310	91.007	112.641
Dependency Ratio	44,26	43,77	42,68	42,62	44,31	46,55

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kota Serang, diolah*

Pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 44,26 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44-45 penduduk usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kota Serang berada pada jendela kesempatan bonus demografi. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi jangka panjang. Adapun jendela bonus demografi di Kota Serang akan terus terlaksana hingga periode ketiga dan pada periode keempat.

Gambar II.19
Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2025-2045



***Sumber**: BPS Provinsi Banten, 2023 (data diolah)*

Dari piramida penduduk Kota Serang, terlihat bahwa semakin mendekati tahun 2045, maka piramida penduduk semakin memiliki distribusi yang tidak jauh berbeda antar kelompok umur. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat semakin baik dengan semakin tingginya usia penduduk

tua. Namun hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Serang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di usia tua sehingga tidak menjadi beban bagi usia produktif lainnya.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kota Serang, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri, dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik kesehatan maupun

pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil proyeksi demografi, Tim Penyusun melakukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk, secara umum dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan setidaknya meliputi:

1. Rumah/Tempat Tinggal

Pada Kawasan urban seperti Kota Serang, pertumbuhan populasi memberikan wujud nyata pada tantangan yang mendesak yaitu kebutuhan akan rumah. Fenomena ini dikenal dengan istilah "*backlog* perumahan" yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan rumah yang memadai. Tingginya *backlog* perumahan menjadi refleksi dari keinginan masyarakat yang berusaha mencari tempat tinggal yang layak. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat, permintaan akan tempat tinggal yang terjangkau dan berkualitas meningkat secara signifikan. Namun, ketersediaan rumah belum mampu mengejar lajunya. Rumah merupakan kebutuhan primer terkait papan yang wajib dimiliki oleh masyarakat.

Dalam dinamika perkotaan yang kompleks, tergambar kebutuhan mendesak akan solusi perumahan yang inovatif dan terjangkau. Rumah tangga yang menghadapi fenomena *backlog* perumahan sering kali menghadapi keterbatasan ekonomi, memaksa mereka tinggal di lingkungan yang kurang berkualitas. Dampaknya tak hanya terbatas pada kondisi perumahan yang tidak layak, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Pentingnya mengatasi *backlog* perumahan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga menyangkut aspek-aspek sosial dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap perumahan yang terjangkau, masyarakat dapat lebih stabil secara ekonomi dan lebih baik mengakses peluang-peluang pendidikan serta pekerjaan. Ini dapat menciptakan efek domino positif yang pada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Serang.

Tabel II.51
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Kebutuhan Rumah	116.101	122.543 - 157.565	138.649 - 173.670	154.754 - 189.775	170.859 - 205.881	186.965 - 221.986

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat *backlog* perumahan Kota Serang berada di angka 116.161 rumah tinggal. Jumlah ini relatif tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat membutuhkan fasilitasi rumah tinggal yang sesuai dengan profil ekonomi yang dimiliki. Permasalahan perumahan selain disebabkan nilai properti yang tinggi, juga dilatarbelakangi oleh terbatasnya ketersediaan lahan. Maka itu pola pembangunan yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada model tapak namun juga pembangunan vertikal yang memiliki daya serap hunian lebih tinggi. Apabila tidak didukung dengan partisipasi yang komprehensif dari Pemerintah terutama lewat kebijakan yang bersifat intervensi maka angka *backlog* perumahan akan terus meningkat. Diprediksi seiring penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga pada kondisi normal, angka akan mencapai 186.965 – 221.986 rumah tinggal pada Tahun 2045.

2. Air Bersih

Dalam upaya memastikan keberlanjutan dan ketersediaan air minum di Kota Serang, analisis proyeksi kebutuhan air menjadi landasan penting bagi perencanaan dan tindakan ke depan. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan air di masa mendatang adalah kunci untuk merancang kebijakan dan infrastruktur yang responsif. Proyeksi kebutuhan air bersih dimulai dengan memahami tren pertumbuhan populasi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sanitasi, dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan proporsional. Oleh karena itu, perencanaan harus mencakup skenario pertumbuhan populasi yang realistis. Pada kawasan urbanisasi seperti Kota Serang, aspek seperti profil penduduk dan entitas ekonomi akan mempengaruhi permintaan air yang ditujukan untuk kebutuhan domestik, industri, dan perdagangan.

Pemetaan ketersediaan sumber daya air menjadi bagian penting dari proyeksi. Proyeksi harus memperhitungkan ketersediaan air permukaan dan air tanah serta risiko kekeringan atau penurunan kualitas air. Analisis ini memberikan pemahaman apakah sumber daya air yang ada dapat memenuhi

kebutuhan yang diproyeksikan. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berkaitan dengan kebutuhan air, terutama di sektor industri dan komersial. Proyeksi kebutuhan air harus mencakup evaluasi dampak pertumbuhan ekonomi dan perluasan industri terhadap konsumsi air, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan air dalam kegiatan ekonomi. Apabila mengacu pada struktur ekonomi Kota Serang, sektor konstruksi dan real estate menduduki peringkat kedua dan ketiga dalam data pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Kedua sektor ini cenderung memiliki korelasi dengan kebutuhan konsumsi air.

Tabel II.52
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (SR)	50.693	52.414-53.120	57.201-59.281	62.425-66.155	68.127-73.827	74.349-82.388

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2023*

Proyeksi kebutuhan air harus mencakup upaya konservasi dan peningkatan efisiensi penggunaan air. Implementasi teknologi dan praktik-praktik konservasi dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya air, memastikan bahwa kebutuhan dapat dipenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Kesiapan Infrastruktur air juga patut diperhitungkan terutama dalam menjawab tantangan kecukupan kapasitas dan kualitas yang tersedia.

Pada Tahun 2023, kebutuhan air minum di Kota Serang mencapai 50.693 sambungan rumah (SR). Kebutuhan air di Kota Serang diperoleh dari PDAM Tirta Albantani dan PDAB Tirta Madani, dimana pengembangan sistem penyediaan air minum adalah salah satu program prioritas. Cakupan peningkatan pipanisasi saluran air diharapkan terus meningkat untuk membuka akses terhadap distribusi air bersih kepada seluruh rumah secara merata. Kebutuhan tingkat SR dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan, Pada Tahun 2045 diprediksi kebutuhan SR meningkat hampir 2 kali lipat di kisaran 74.349 - 82.388. Dibutuhkan partisipasi banyak pihak, termasuk Pemkot Serang, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menyusun langkah integral dalam memenuhi kebutuhan air. Keterlibatan ini memastikan bahwa solusi-solusi yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

3. Energi/listrik

Dalam upaya merencanakan kebutuhan listrik di masa depan, pemahaman menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi permintaan energi dan ketersediaan sumber daya listrik sangat penting. Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi berdampak signifikan pada kebutuhan listrik. Proyeksi harus mempertimbangkan pergeseran pola konsumsi energi seiring dengan proses urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Dengan perkembangan teknologi, sektor-sektor seperti transportasi, industri, dan teknologi informasi semakin mengadopsi elektrifikasi. Proyeksi kebutuhan listrik perlu memperhitungkan dampak dari elektrifikasi sektor-sektor baru ini. Pertumbuhan teknologi memiliki peran kunci dalam proyeksi kebutuhan listrik. Inovasi dalam efisiensi energi dan perkembangan teknologi penyimpanan energi dapat memengaruhi cara kebutuhan listrik diproyeksikan di masa mendatang. Langkah-langkah konservasi dan peningkatan efisiensi energi merupakan strategi krusial dalam manajemen kebutuhan listrik. Inovasi teknologi yang mendukung penggunaan energi yang lebih efisien dapat membantu mengimbangi pertumbuhan permintaan. Kondisi infrastruktur energi juga memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan listrik. Proyeksi perlu mempertimbangkan investasi dalam pengembangan pembangkit, jaringan distribusi, dan teknologi penyimpanan energi untuk memastikan pasokan yang andal.

Tabel II.53
Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Jumlah Rumah	116.101	122.543 -157.565	138.649- 173.670	154.754 - 189.775	170.859 - 205.881	186.965 - 221.986
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KWh)	647.753 .455	769.225. 780	974.838. 196	1.235.410 .374	1.565.632 .942	1.984.123. 301

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Serang dalam Angka, 2023*

Pada Tahun 2022, tingkat konsumsi listrik di Kota Serang mencapai 647.753.455 Kwh. Angka ini diprediksi akan terus tumbuh seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi hingga diprediksi kebutuhan listrik mencapai 1.984.123.301 Kwh di tahun 2045. Penggunaan alat kelistrikan yang efisien dan perubahan perilaku konsumsi listrik akan menjadi katalisator penting untuk mengendalikan konsumsi listrik di Kota Serang sehingga mampu mengurangi kebutuhan listrik yang tidak efisien.

4. Persampahan

Timbulan sampah mengacu pada jumlah total sampah yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau komunitas dalam periode waktu tertentu. Sampah ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, industri, perdagangan, dan sektor layanan. Timbulan sampah menjadi indikator utama aktivitas konsumsi dan produksi dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah melibatkan berbagai aspek, seperti pola konsumsi masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah, infrastruktur daur ulang, dan kesadaran lingkungan. Semakin meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup cenderung meningkatkan timbulan sampah.

Penting untuk mengelola timbulan sampah dengan bijak guna mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Praktik pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan energi dari sampah menjadi pendekatan yang umum digunakan untuk mengelola timbulan sampah secara berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mengurangi timbulan sampah dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan.

Tabel II.54
Proyeksi Timbulan Sampah Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Timbulan Sampah (kg)	219.503.030	208.026.640	217.703.520	232.750.280	246.684.520	258.146.798

Sumber: *https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan*

Tata kelola timbulan sampah saat ini menjadi permasalahan laten pada banyak kota-kota besar termasuk Kota Serang. Produksi sampah cenderung terus meningkat seiring penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil survei nasional. Setiap penduduk menghasilkan rerata sampah sebanyak 0,8 kg per hari. Pada Tahun 2023, produksi timbulan sampah Kota Serang mencapai 219.503,03 ton. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong menjadi tujuan akhir pembuangan sampah yang diproduksi Kota Serang. Diindikasikan bahwa TPA ini sudah mencapai *over capacity* dan diperlukan revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya manfaat dari TPA Cilowong. Masalah sampah tidak hanya terjadi pada TPA Cilowong namun juga adanya masalah sampah liar yang tersebar di beberapa

titik di wilayah Kota Serang. Pemkot Serang berkomitmen untuk menindaklanjuti permasalahan sampah secara bijak dan komprehensif.

5. Sarana Kesehatan

Infrastruktur di bidang kesehatan merupakan upaya dalam mewujudkan standar pelayanan minimal pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Adapun upaya mencapai SDM Kota Serang yang unggul di tahun 2045, maka dibutuhkan unit kesehatan rumah sakit sebanyak 16 unit, 1 rumah sakit bersalin, 21 unit puskesmas, 46 unit poliklinik, 9 puskesmas pembantu, 34 unit apotek, dan 664 unit posyandu.

Tabel II.55
Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
• Rumah sakit	11	12	13	14	15	16
• Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	1	1	1
• Puskesmas	16	17	18	19	20	21
• Poliklinik	35	36	38	41	43	46
• Puskesmas Pembantu	7	7	8	8	9	9
• Apotek	26	27	29	30	32	34
• Posyandu	648	648	648	648	648	648

Sumber: data diolah

6. Sarana Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan merupakan modal dasar dalam membangun SDM Kota Serang yang berkualitas. Berbagai upaya terus dilakukan khususnya dalam meningkatkan mutu dan inklusifitas pendidikan. Dalam upaya mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045, maka Kota Serang membutuhkan sarana prasarana pendidikan yang ideal dimana diharapkan terdapat 228 unit TK/RA; 286 unit SD/MI; 150 unit SMP/MTS dan 115 unit SMA/MA/SMK.

Tabel II.56
Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Serang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	723.794	745.557	797.068	844.788	888.065	926.232
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
• TK/RA	228	228	228	228	228	228
• SD/MI	289	289	289	289	289	289
• SMP/MTS	147	147	150	150	150	150
• SMA/MA/SMK	106	108	115	115	115	115

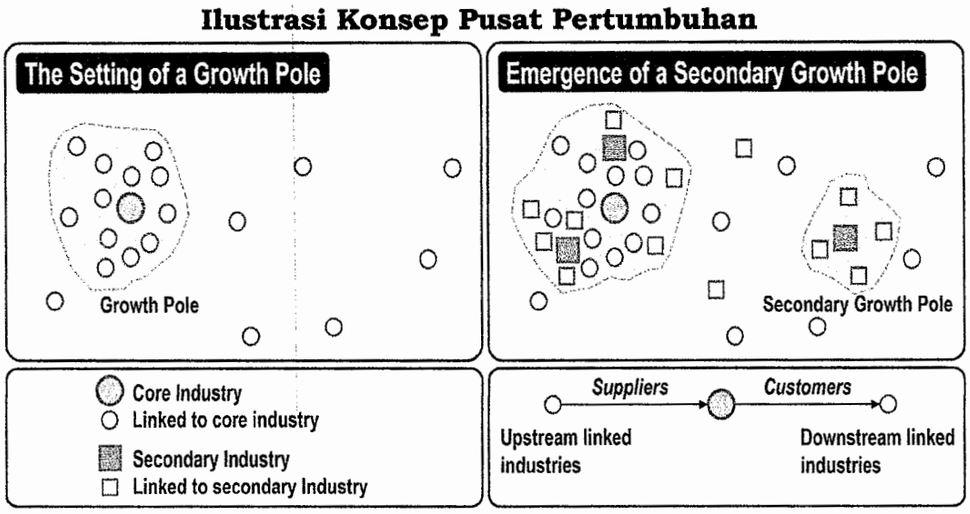
Sumber: data diolah

2.7 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA SERANG

Pusat pertumbuhan, atau dikenal sebagai konsep growth pole, merupakan suatu kerangka yang memiliki peran penting dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Teori Growth Pole, yang pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan dan menganalisis pola pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks daerah atau wilayah tertentu, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai penggerak bagi perkembangan ekonomi di sekitarnya, baik melalui investasi, inovasi, maupun pertumbuhan pesat dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Pusat pertumbuhan tersebut umumnya menjadi fokus pengembangan ekonomi, menampung sektor-sektor kunci seperti industri, perdagangan, dan jasa. Infrastruktur yang berkembang dengan baik, termasuk sistem transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, mendukung pertumbuhan pusat tersebut dan memfasilitasi integrasi kegiatan ekonomi di seluruh wilayah.

Gambar II.20
Ilustrasi Konsep Pusat Pertumbuhan



Sumber: data diolah